



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lt.5, Telp (021) 28088808, Fax (021) 28088803

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI  
NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 91 -DPPPA.Set/IV/2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun peta proses bisnis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
  - b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu disusun peta proses bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 21);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 23).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
  2. Berita Acara Rapat Nomor : 000.8.3.1/141/DPPPA.Set tanggal 14 April 2025 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :
1. Peta Proses Bisnis Level 0 memuat seluruh proses bisnis pada Dinas Sosial Kota Bekasi yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
  2. Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran/turunan dari peta proses bisnis Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di Level 0;

3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n), merupakan penjabaran/turunan dari proses bisnis Level 1 dan diturunkan sampai dengan level terkecil; dan
4. Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* (CFM), merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BEKASI,



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI

Tembusan Yth. :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

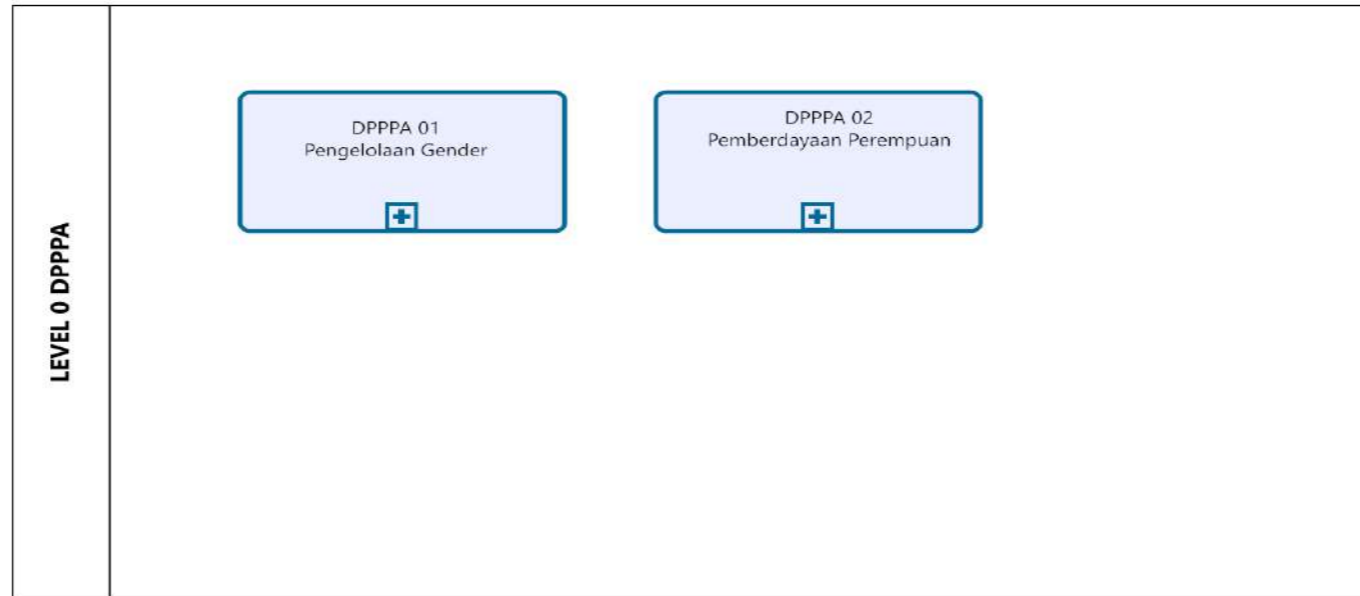
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 91 -DPPPA.Set/IV/2025

TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

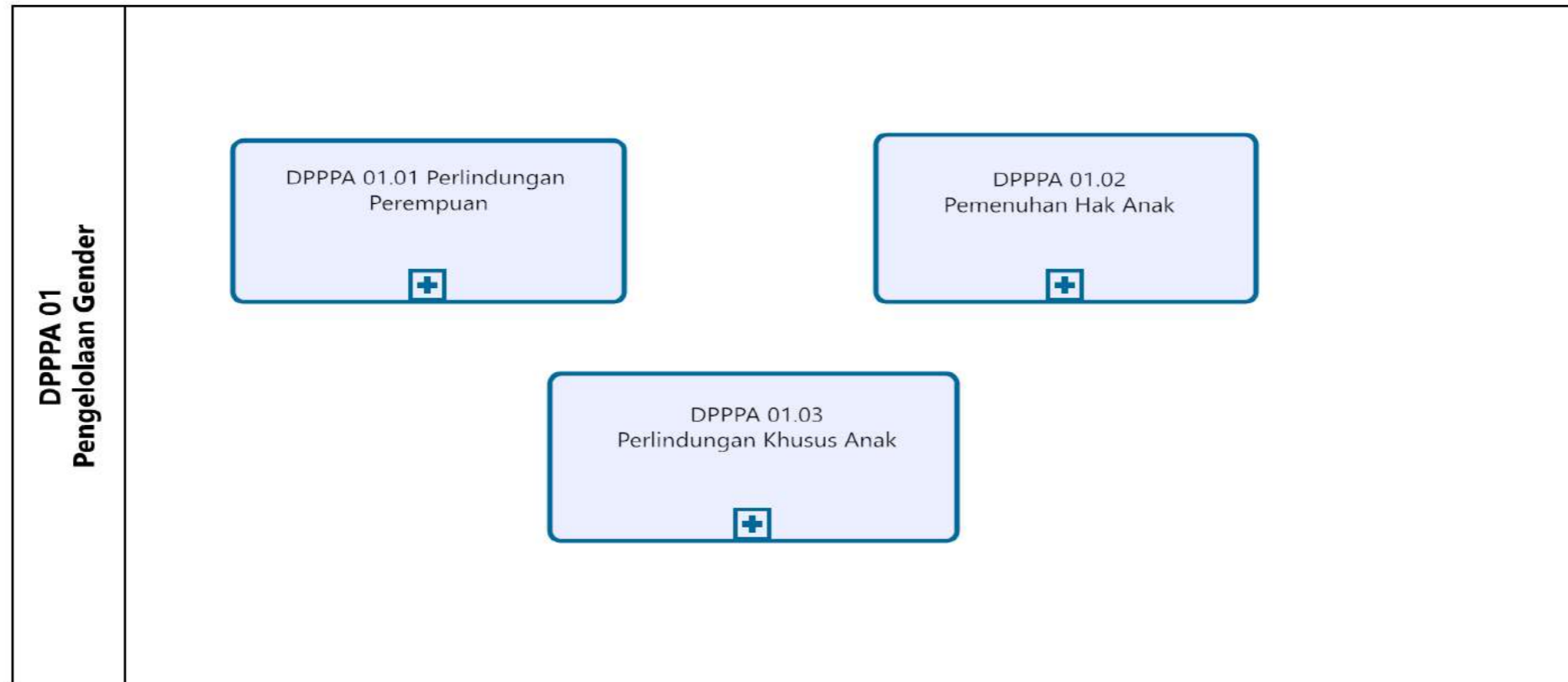
PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026

Proses Bisnis Level 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi



Proses Bisnis Level 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01



Proses Bisnis Level 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01



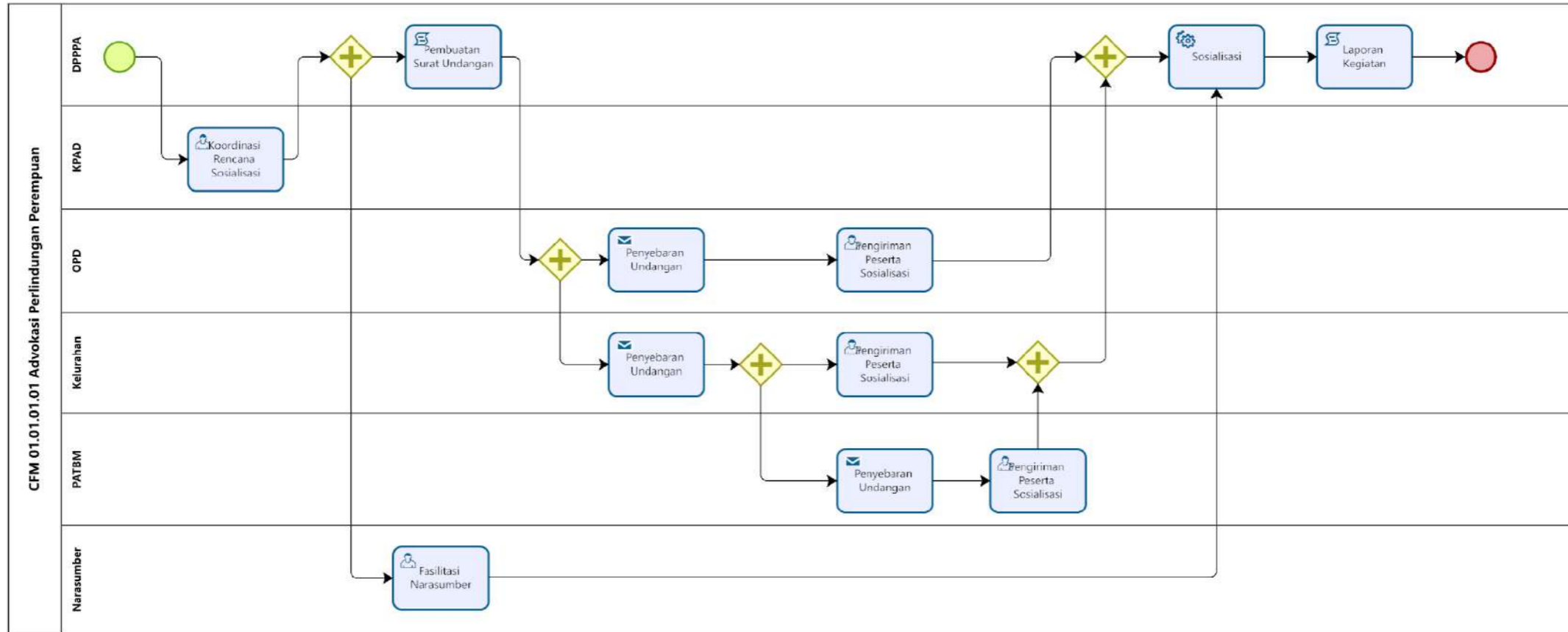
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01.01



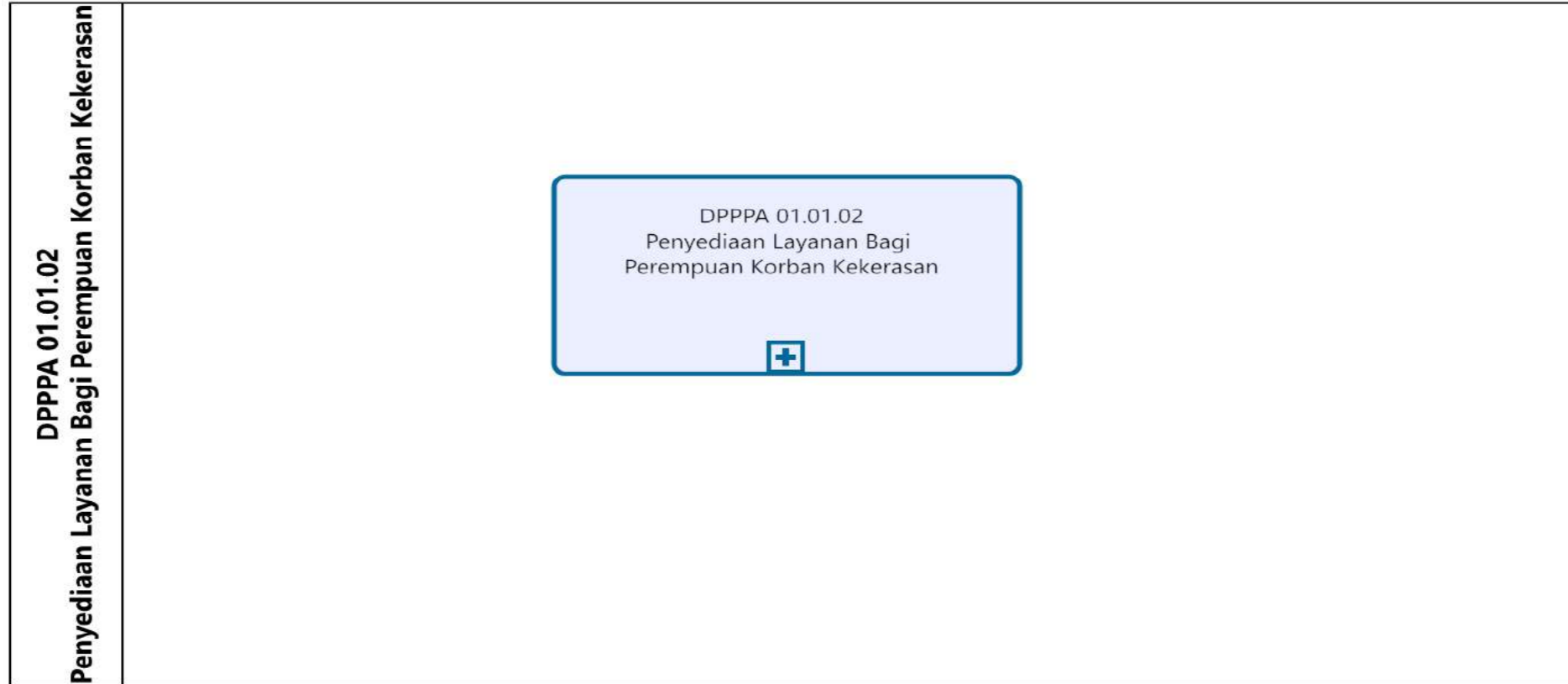
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01.01.01



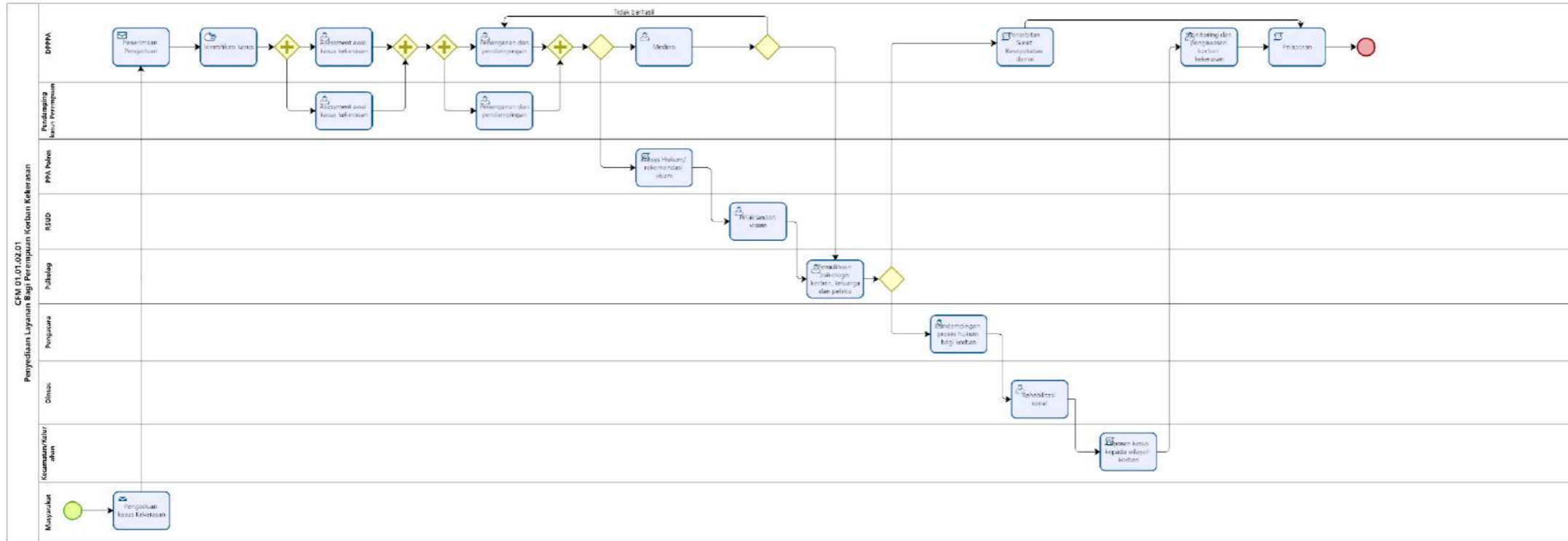
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01.02



# CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

## DPPPA 01.01.02.01



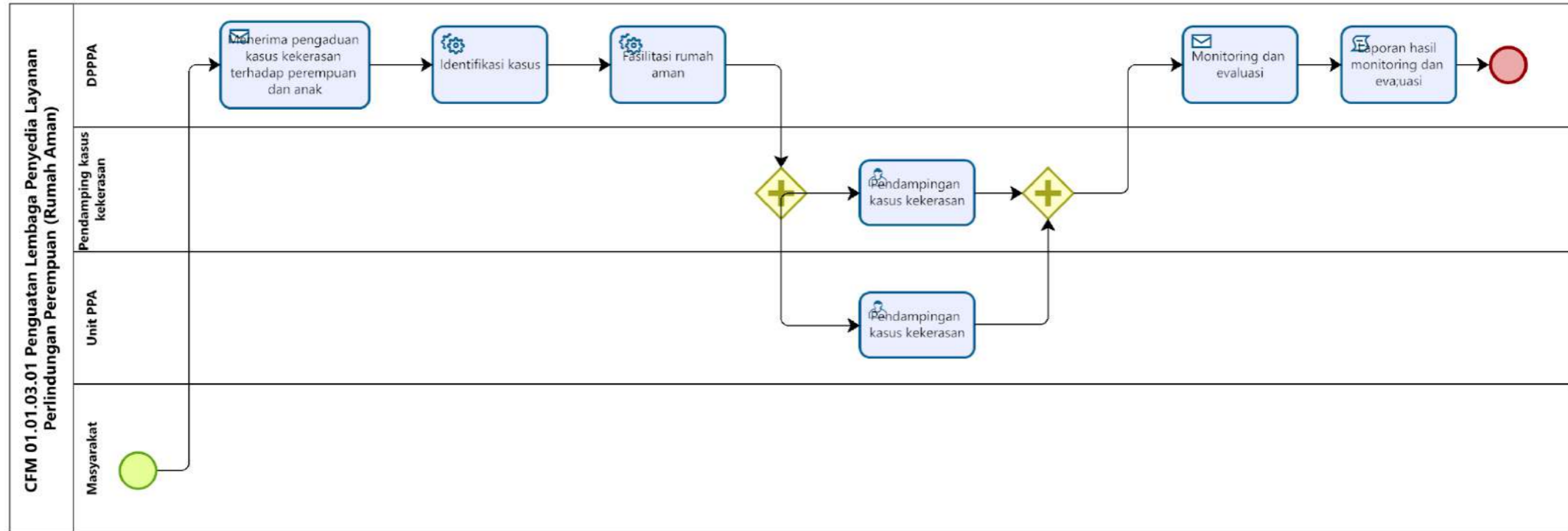
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01.03



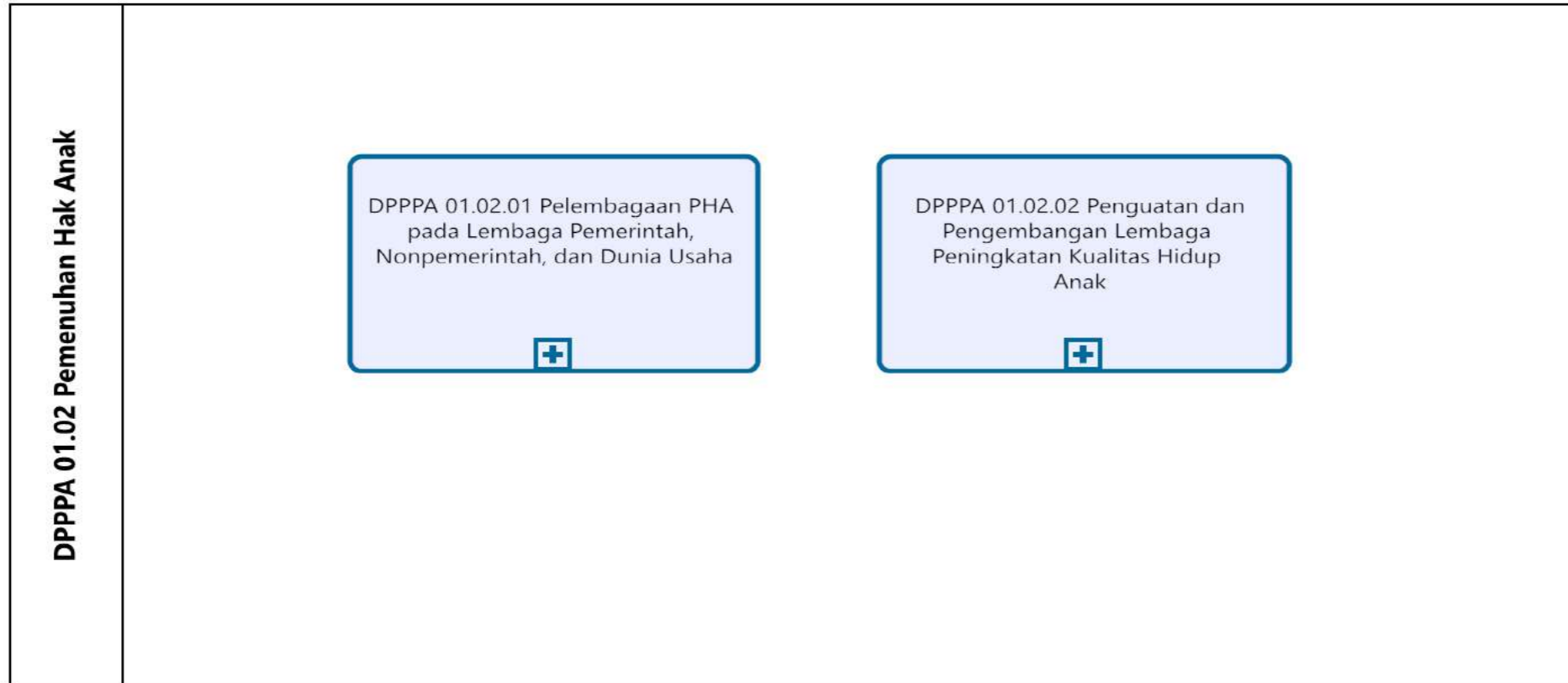
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.01.03.01



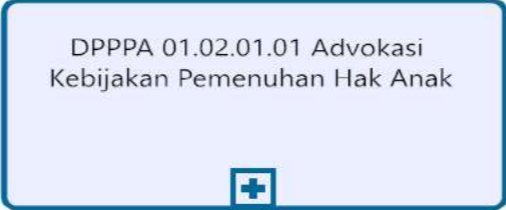
Proses Bisnis Level 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02



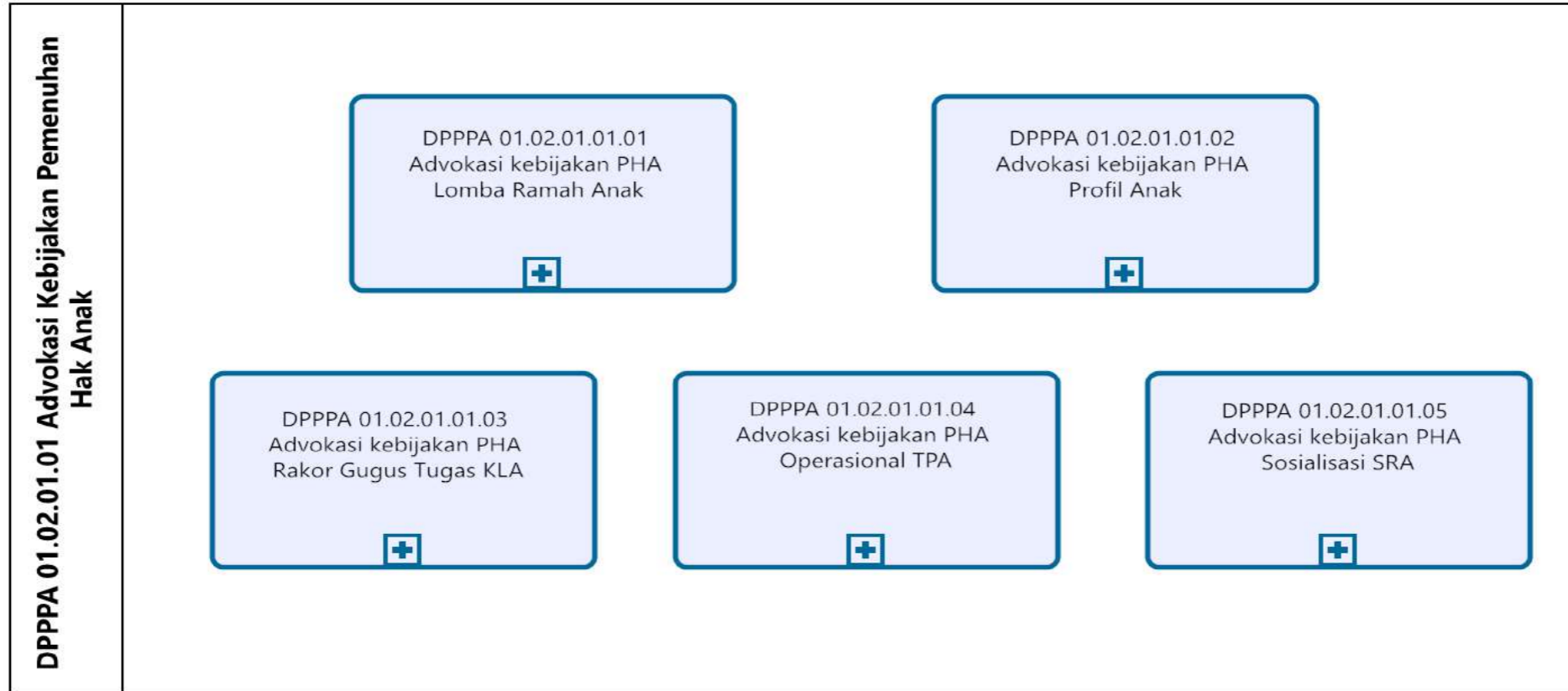
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.01

<p><b>DPPPA 01.02.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b></p>	<p>DPPPA 01.02.01.01 Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak</p> 
--	---

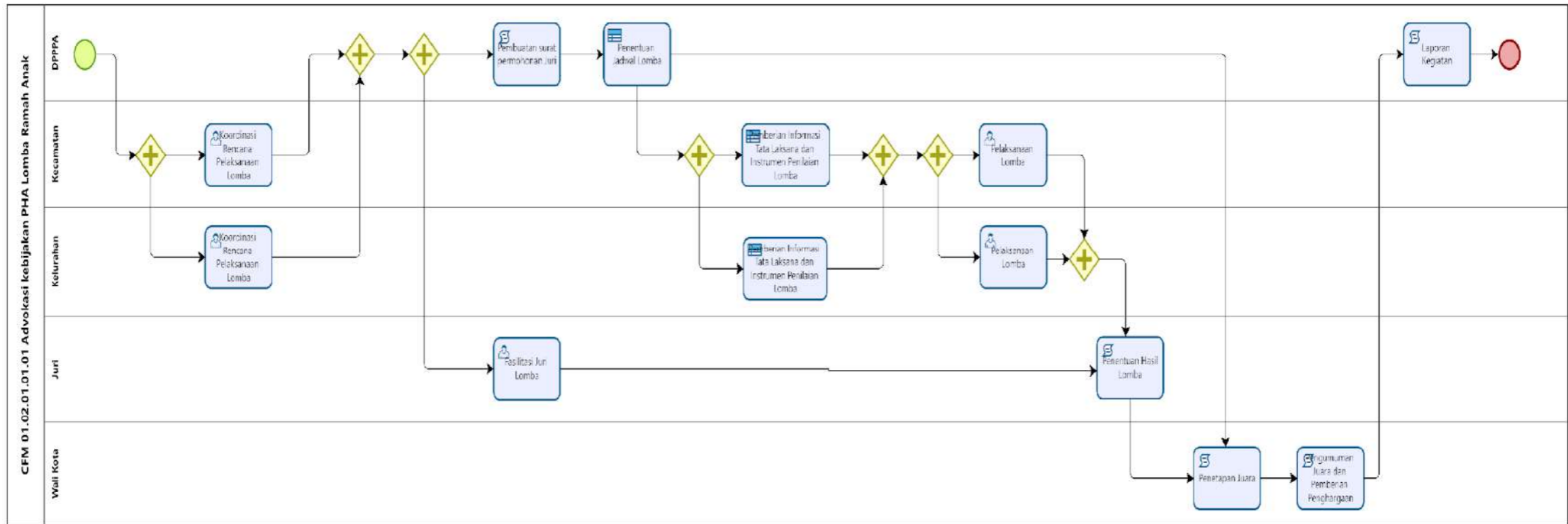
Proses Bisnis LEVEL 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.01.01



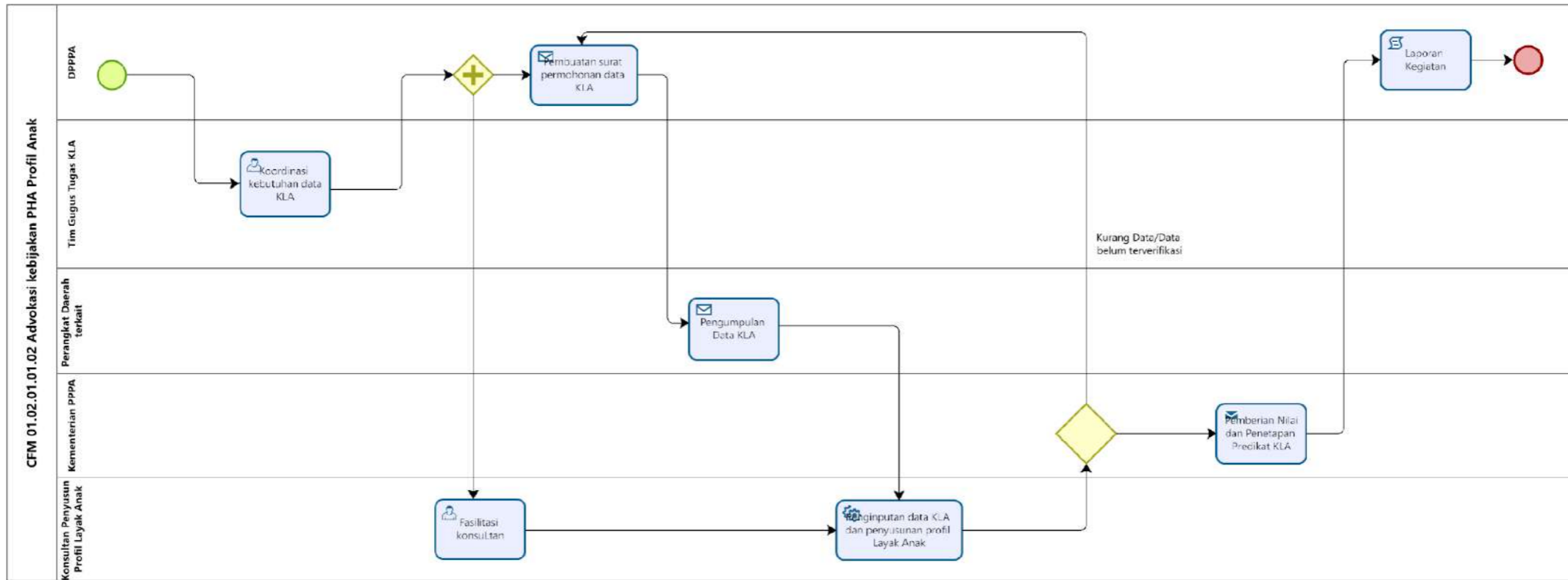
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.01.01.01



CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

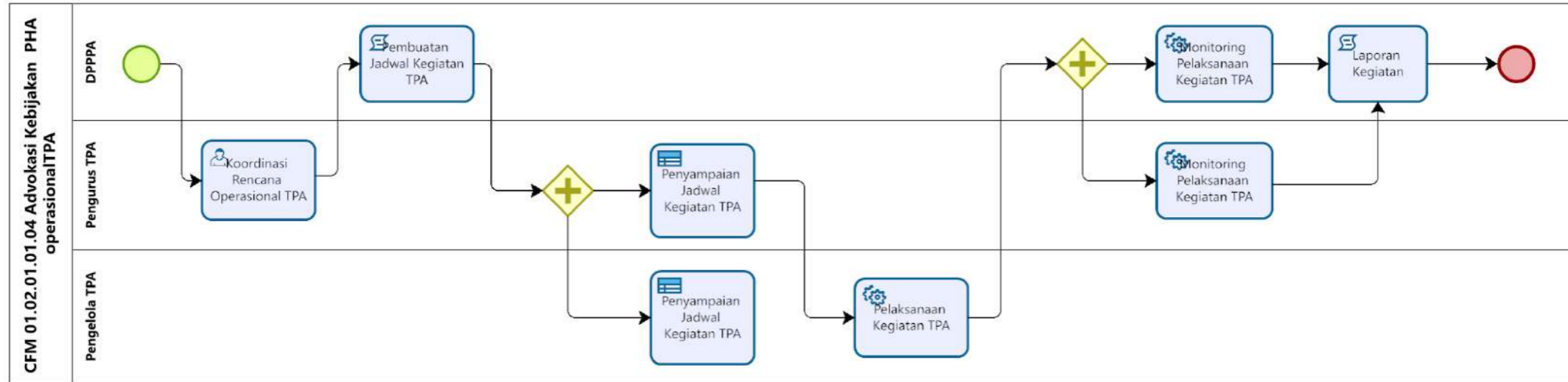
DPPPA 01.02.01.01.02





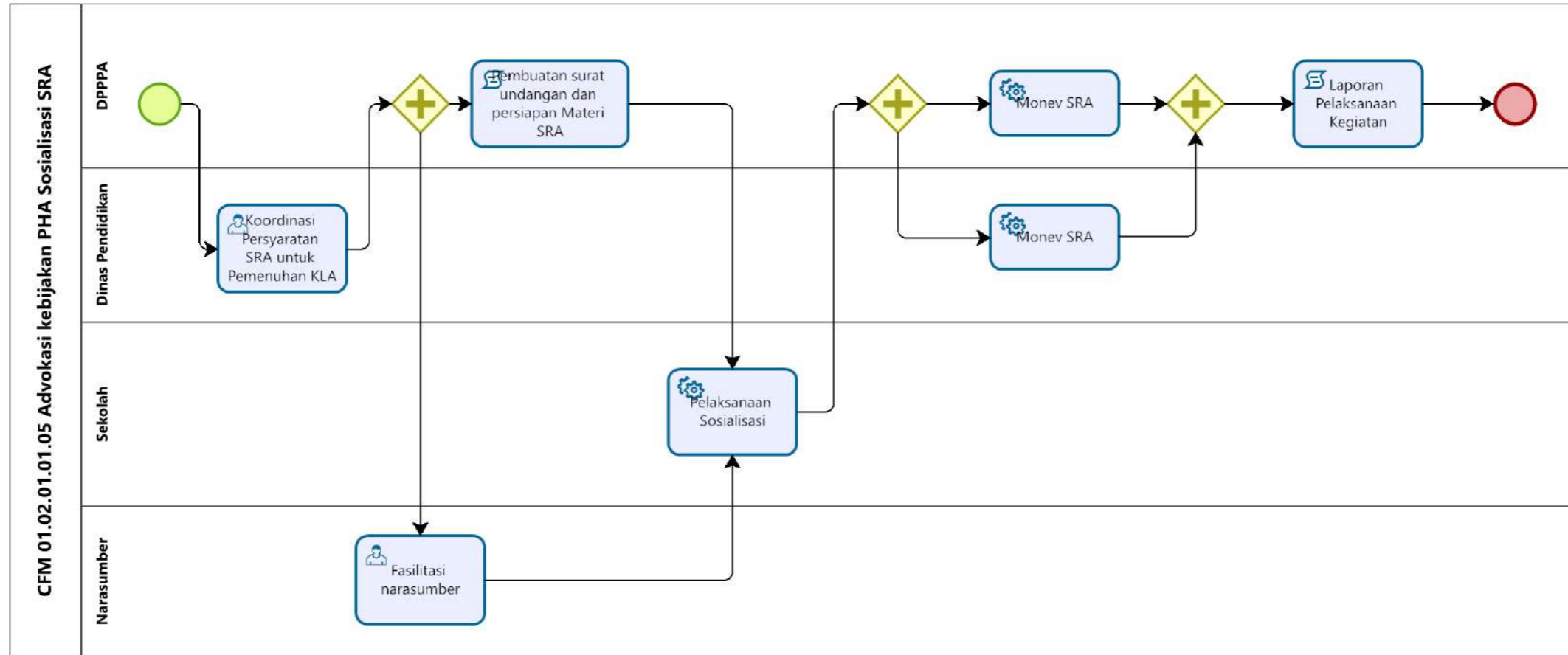
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.01.01.04



CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.01.01.05



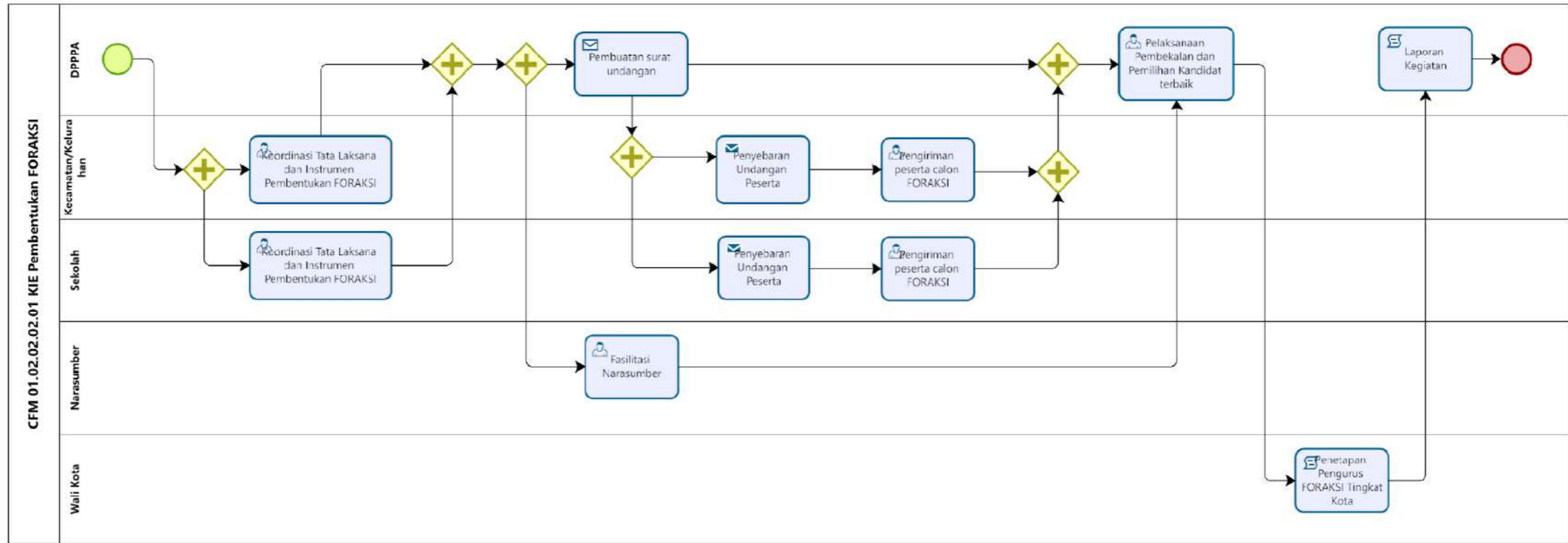
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02



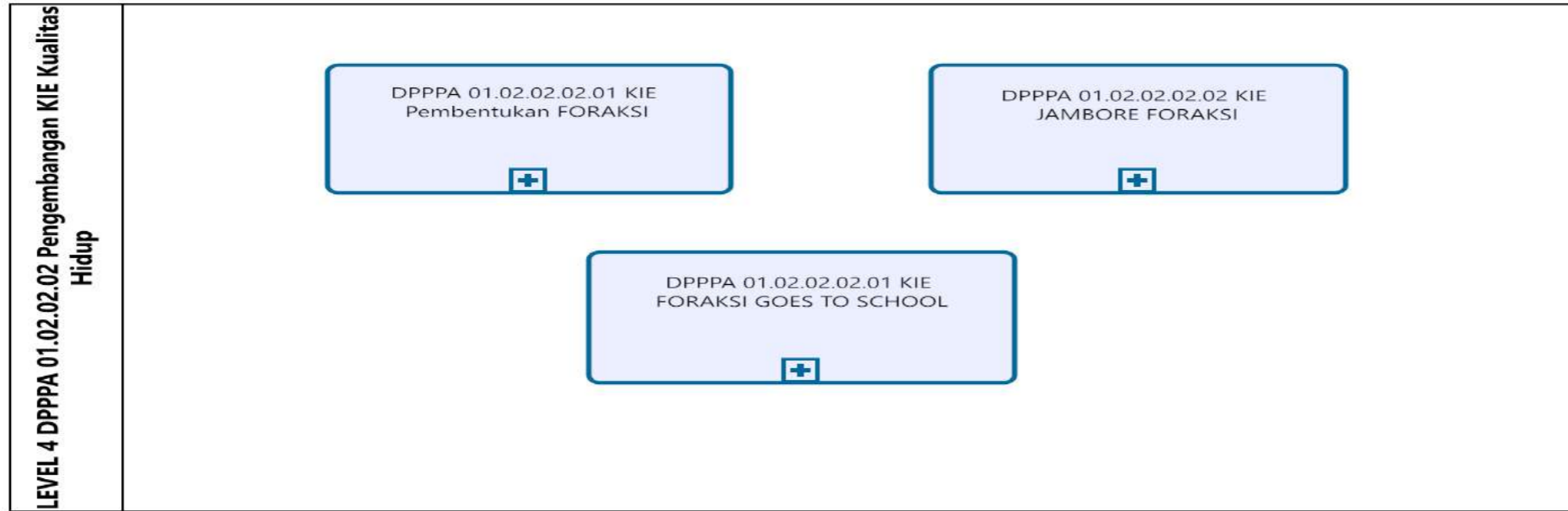
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02.01



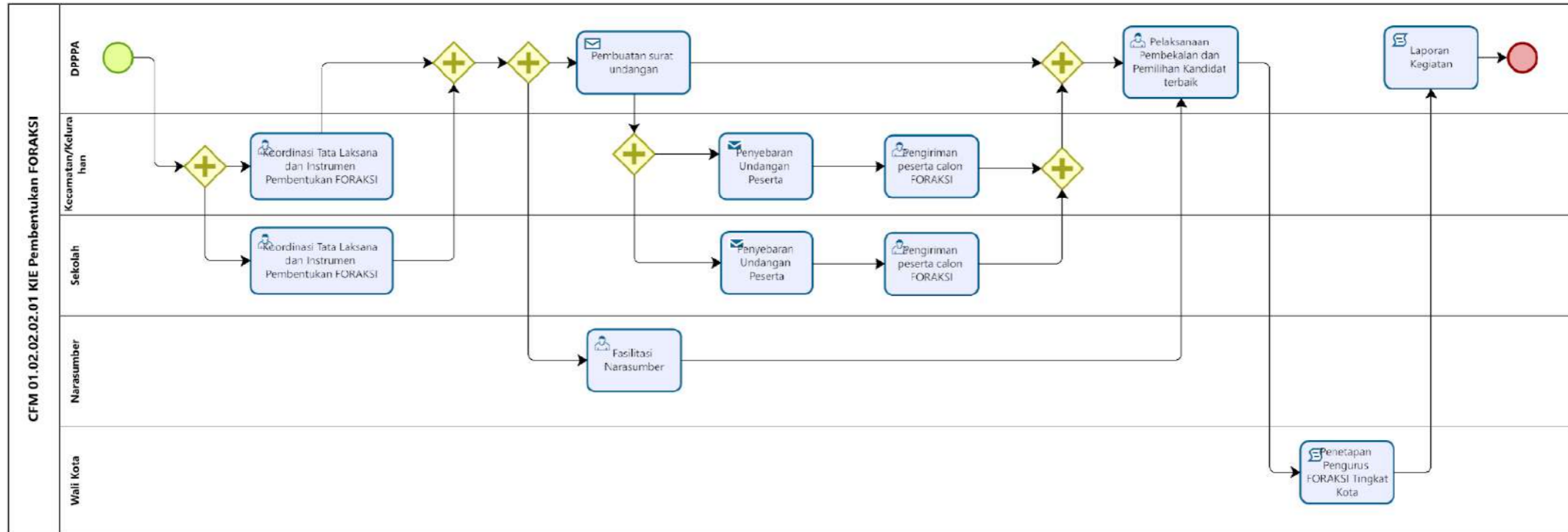
Proses Bisnis Level 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02.02.02



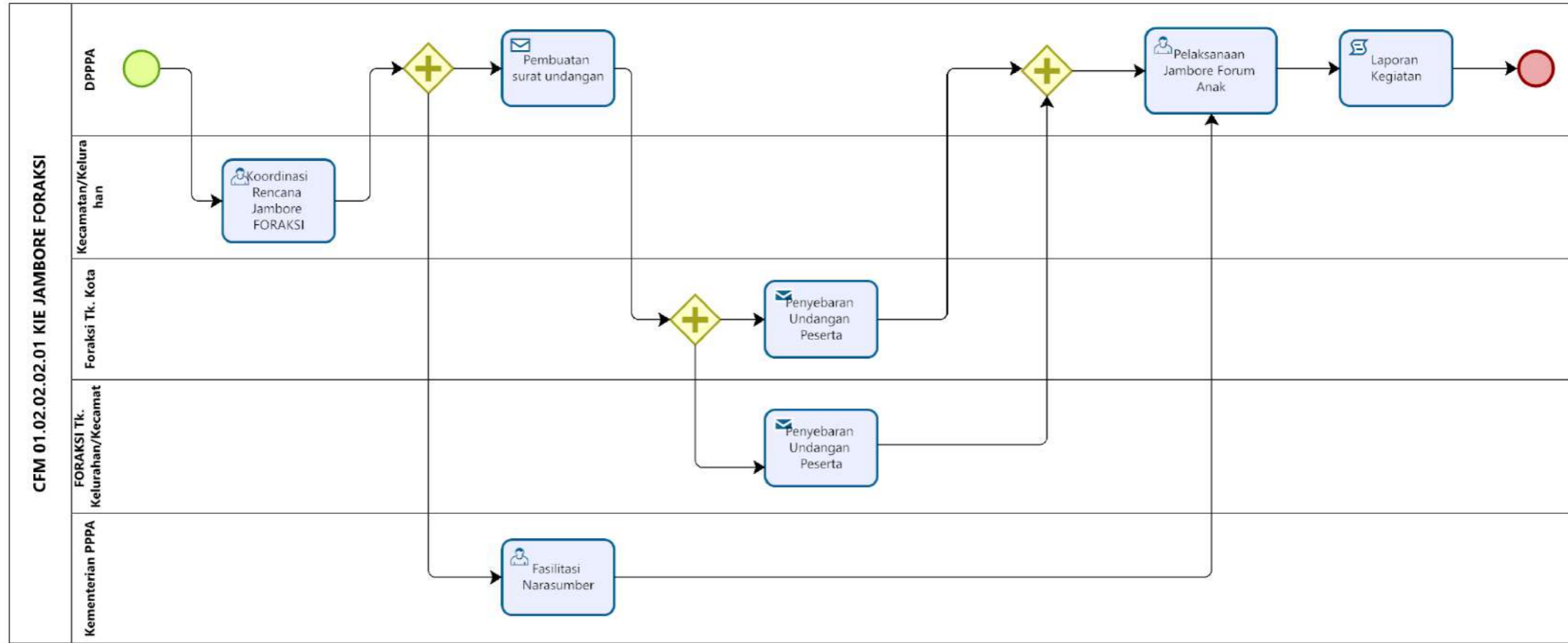
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02.02.01



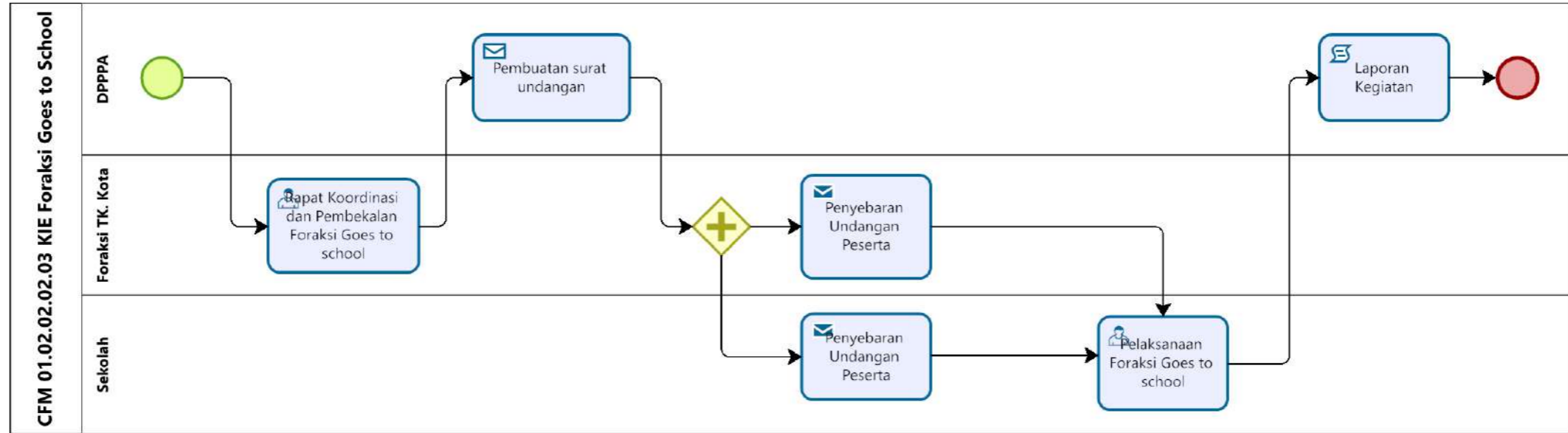
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02.02.02



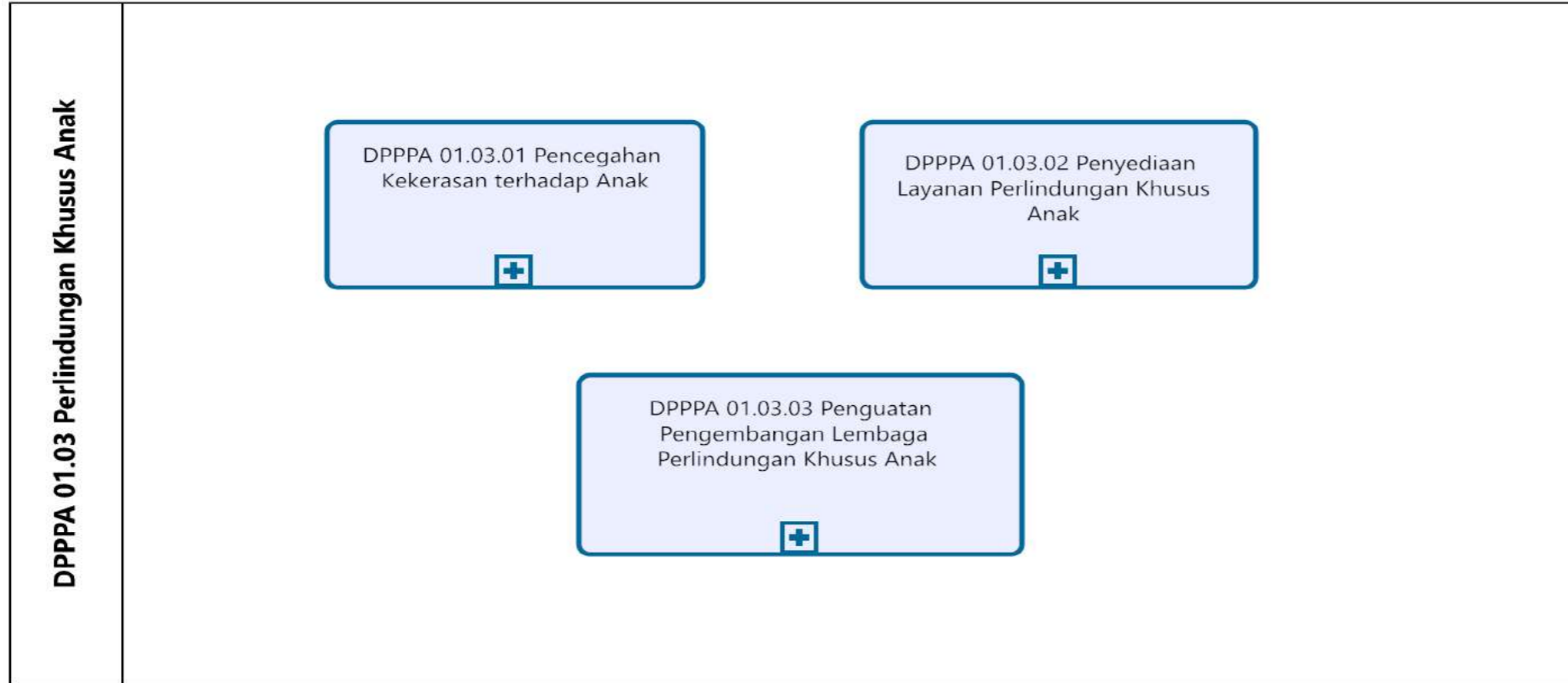
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.02.02.02.03



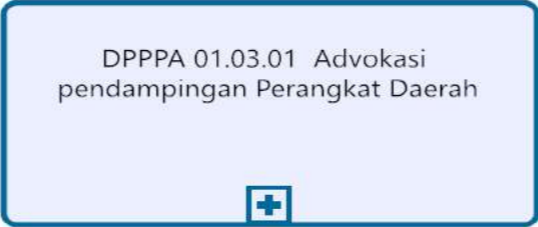
Proses Bisnis Level 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03



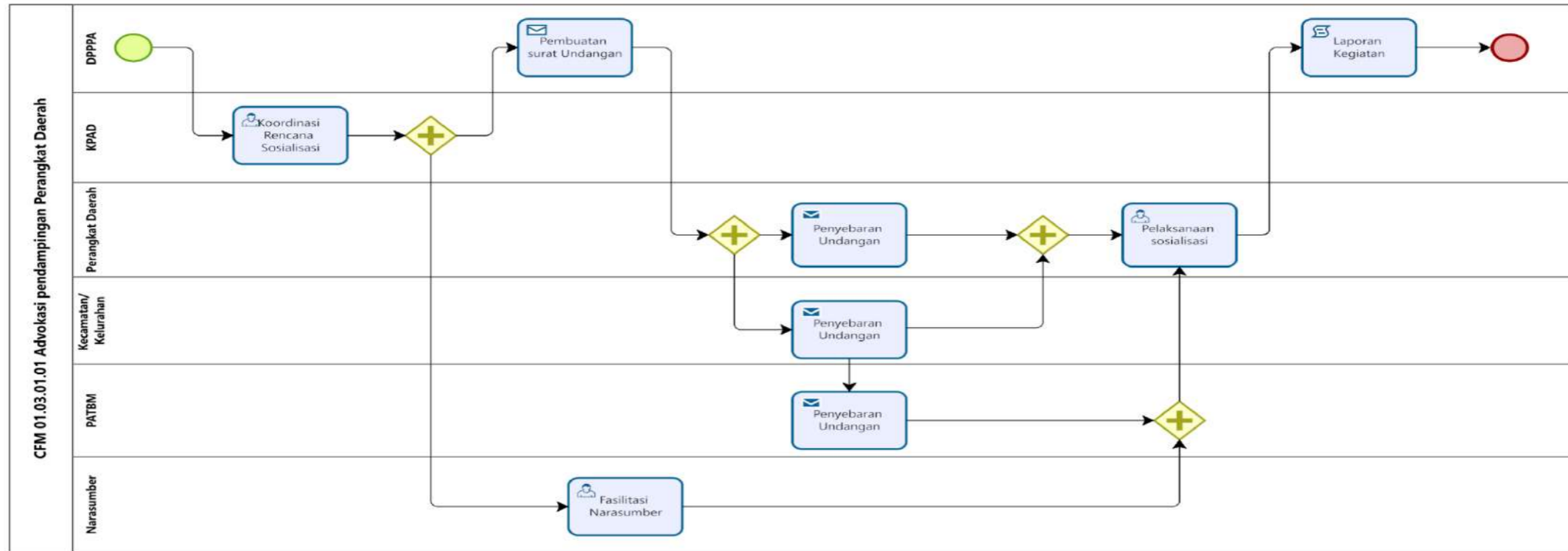
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.01

<p><b>Level 3 DPPPA 01.03.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak</b></p>	<p>DPPPA 01.03.01 Advokasi pendampingan Perangkat Daerah</p> 
---	--

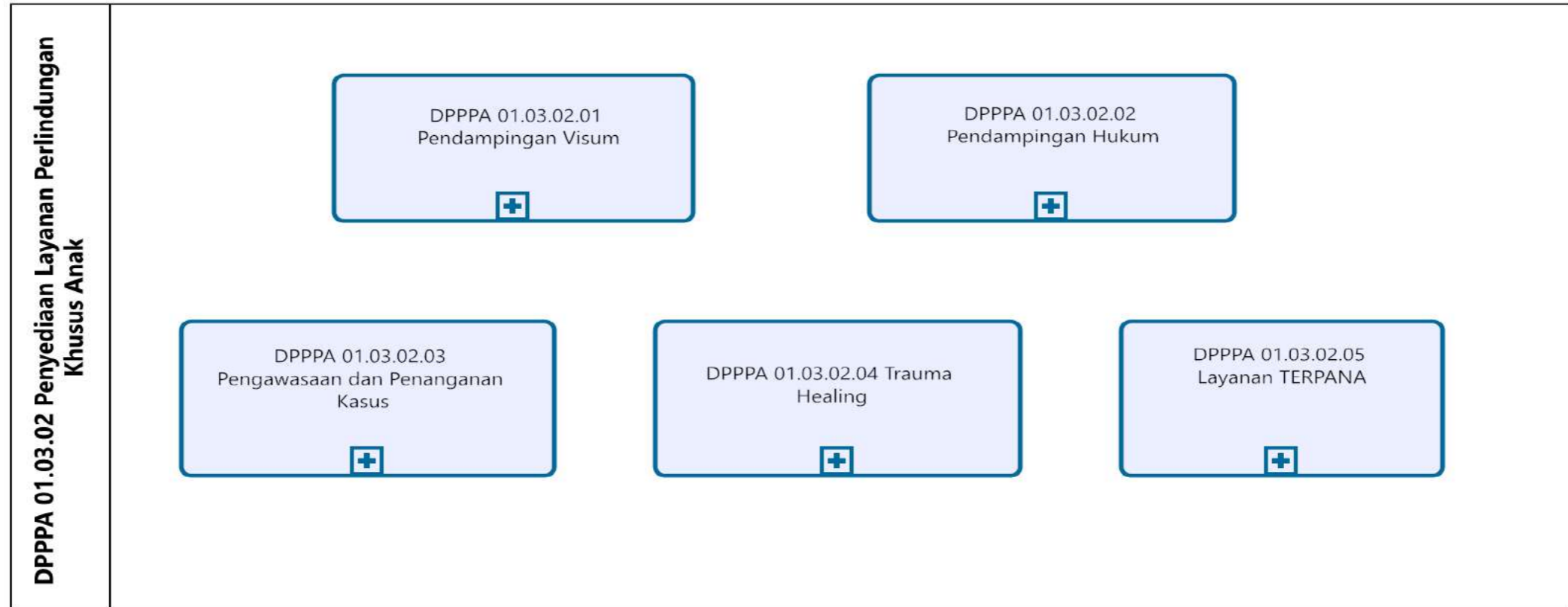
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.01.01



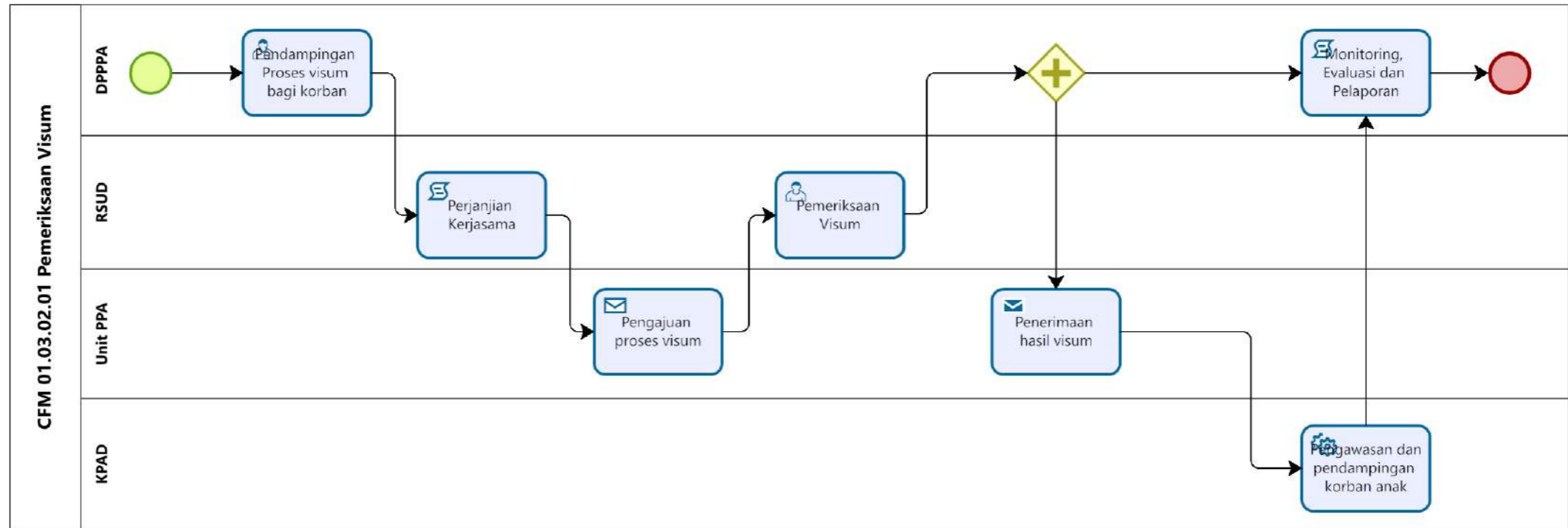
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.02



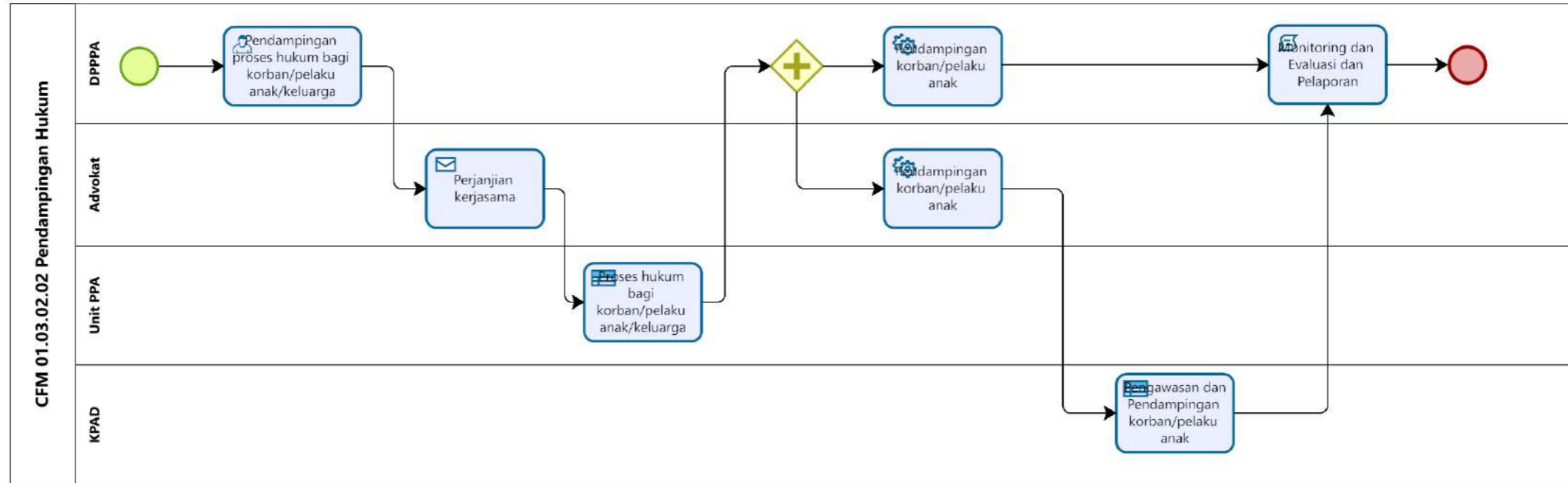
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.02.01



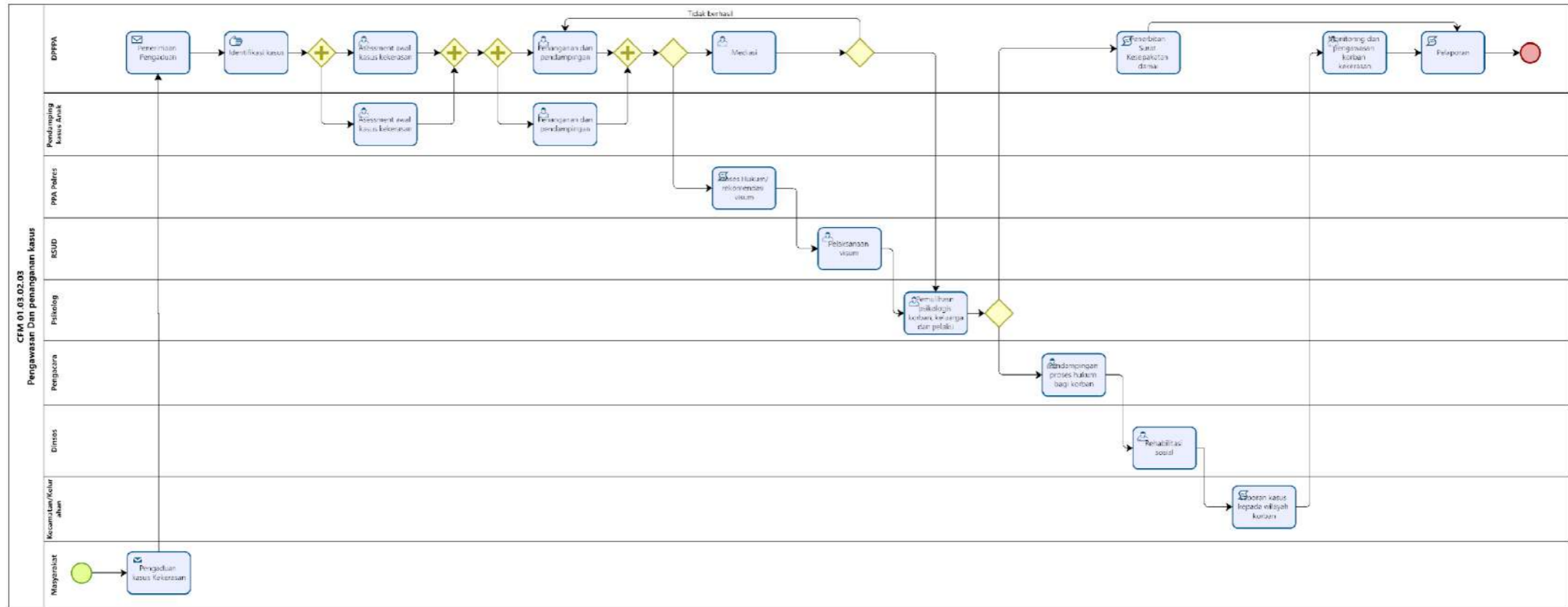
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.02.02



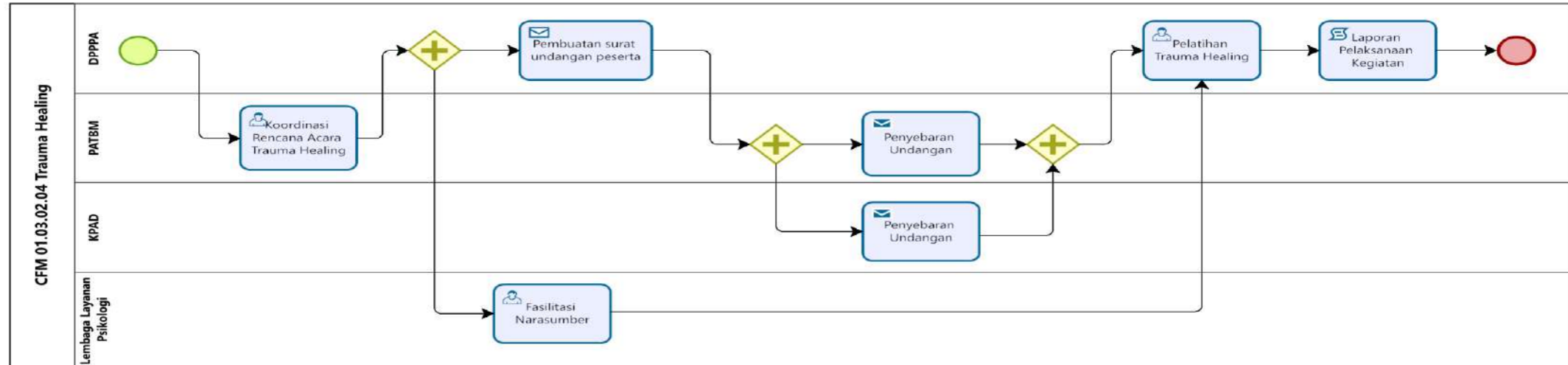
# CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

## DPPPA 01.03.02.03



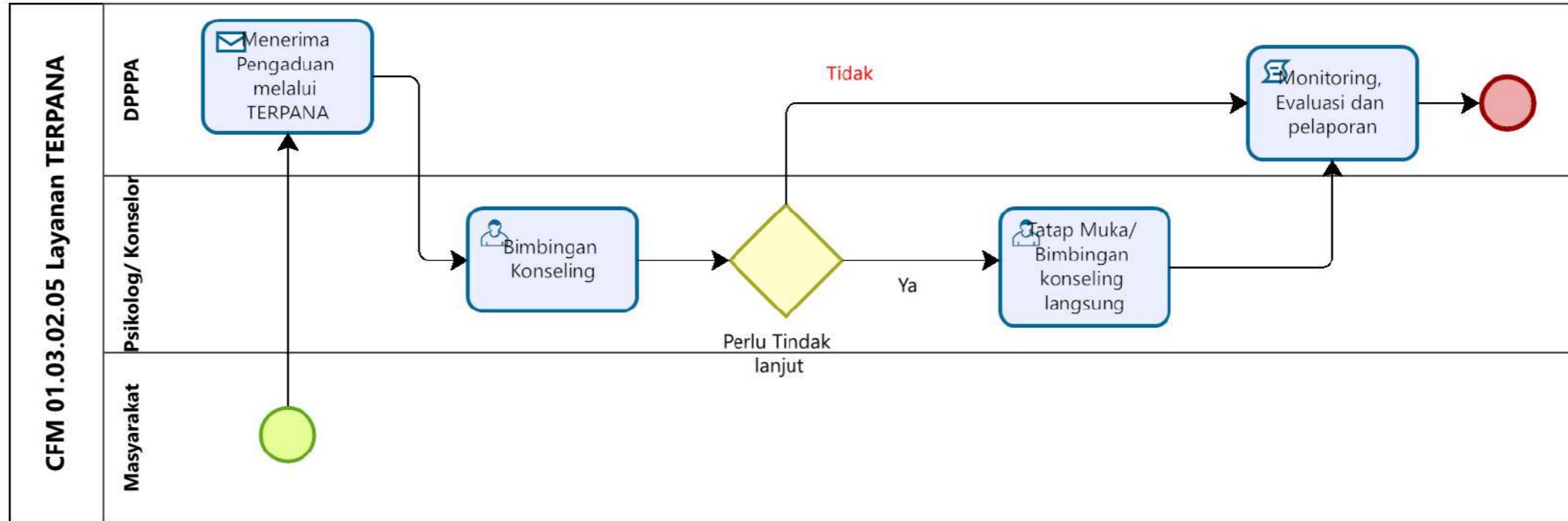
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.02.04




CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.02.05



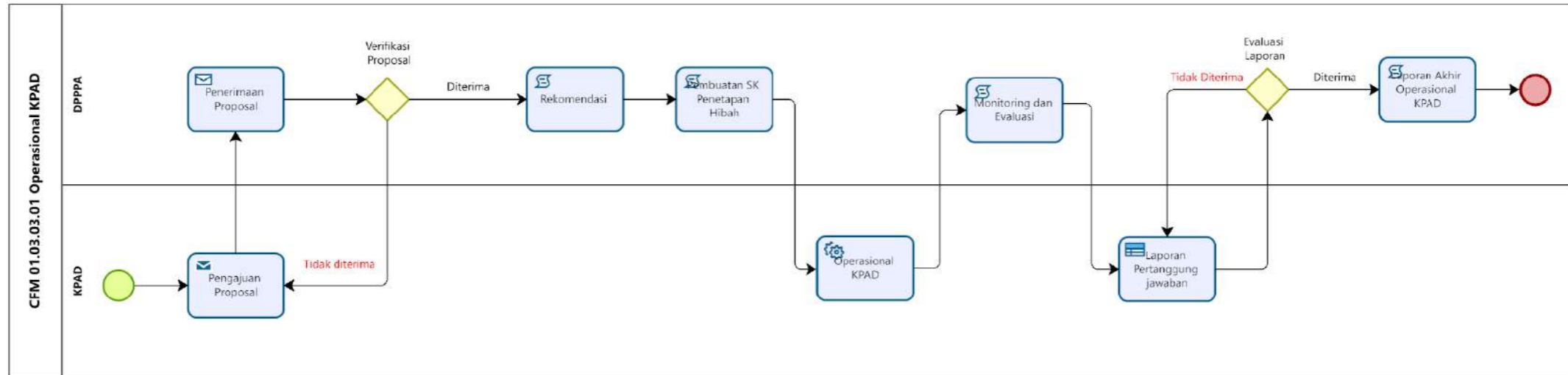
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.03

<p><b>DPPPA 01.03.03 Penguatan Pengembangan Lembaga Perlindungan Khusus Anak</b></p>	<p>DPPPA 01.03.03 Penguatan Pengembangan Lembaga Perlindungan Khusus Anak</p> 
--	---

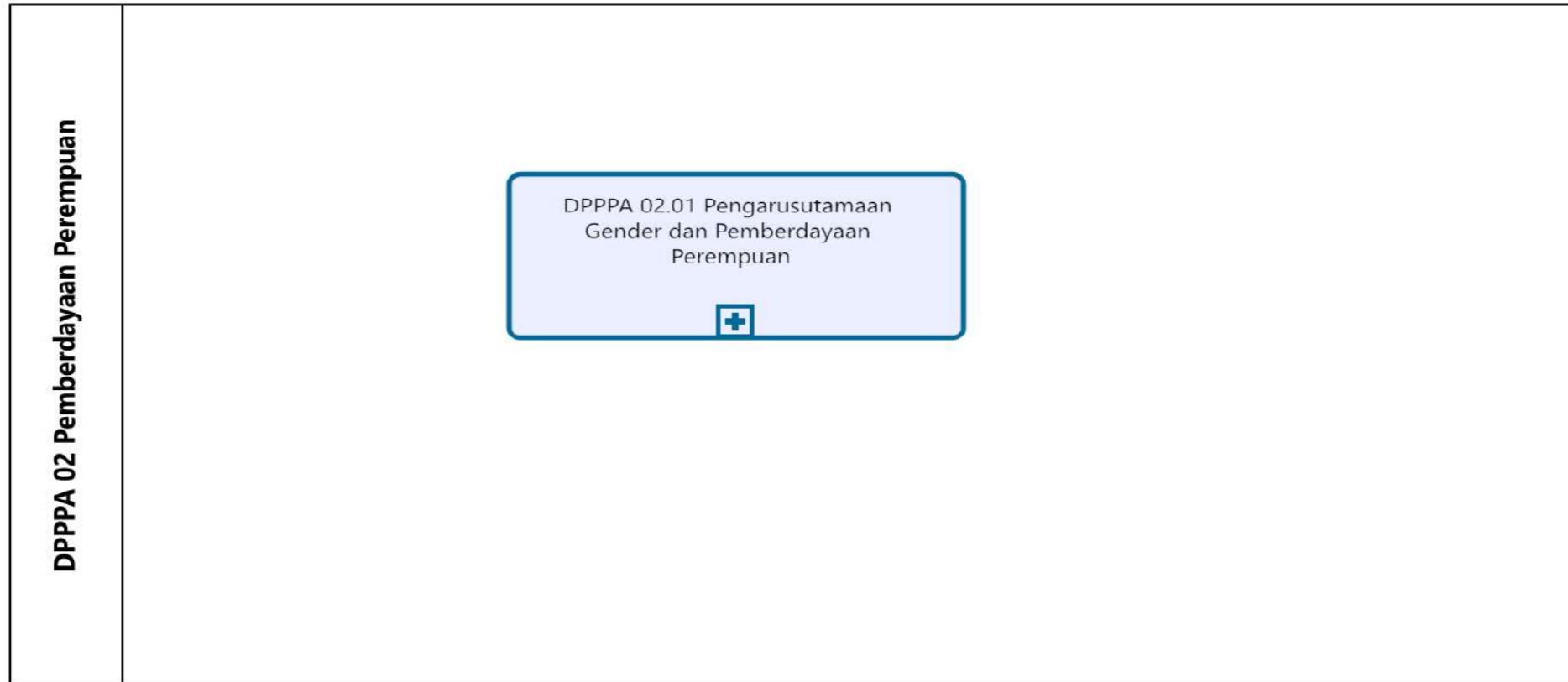
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 01.03.03.01



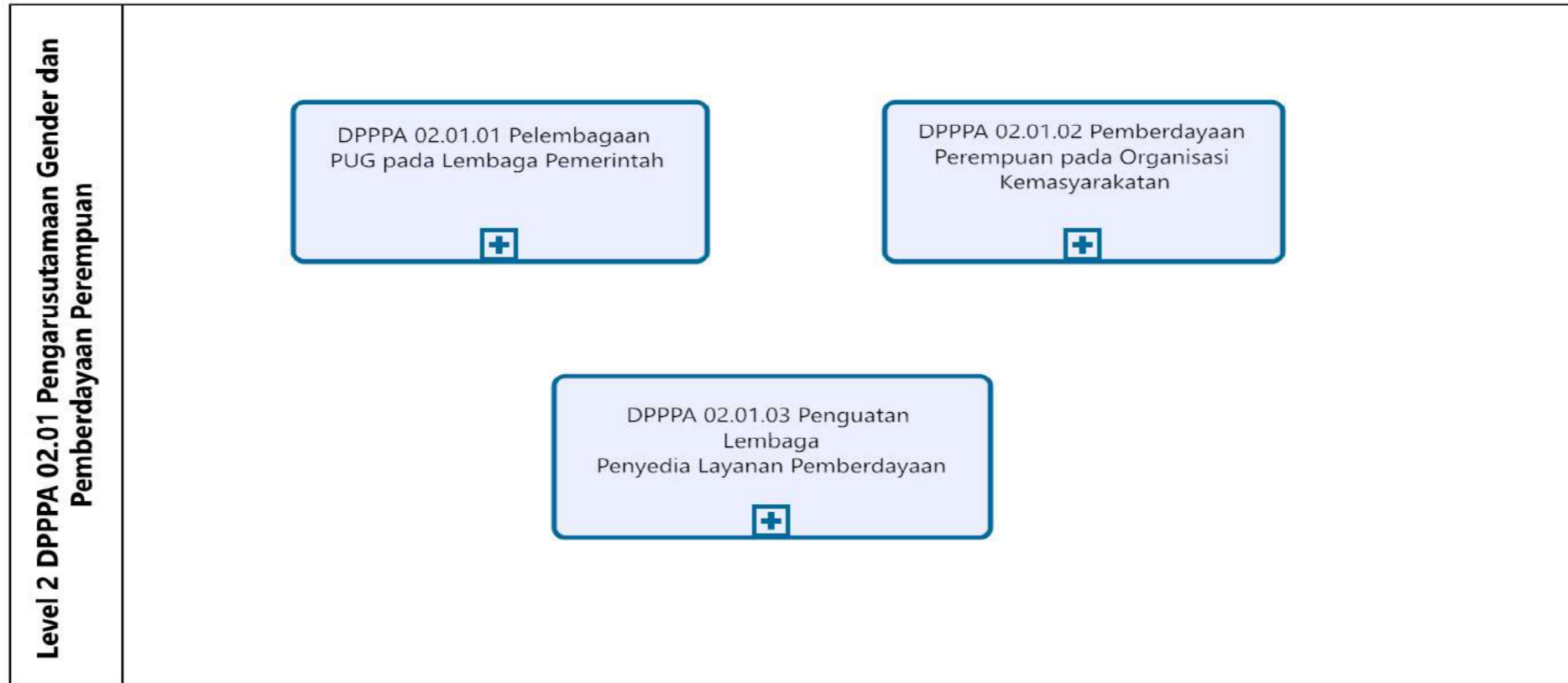
Proses Bisnis Level 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02



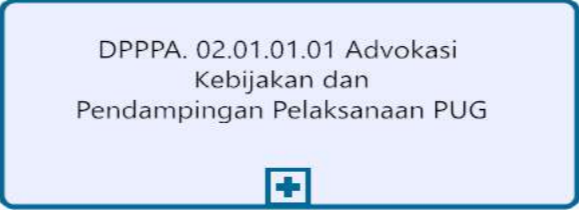
Proses Bisnis Level 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01



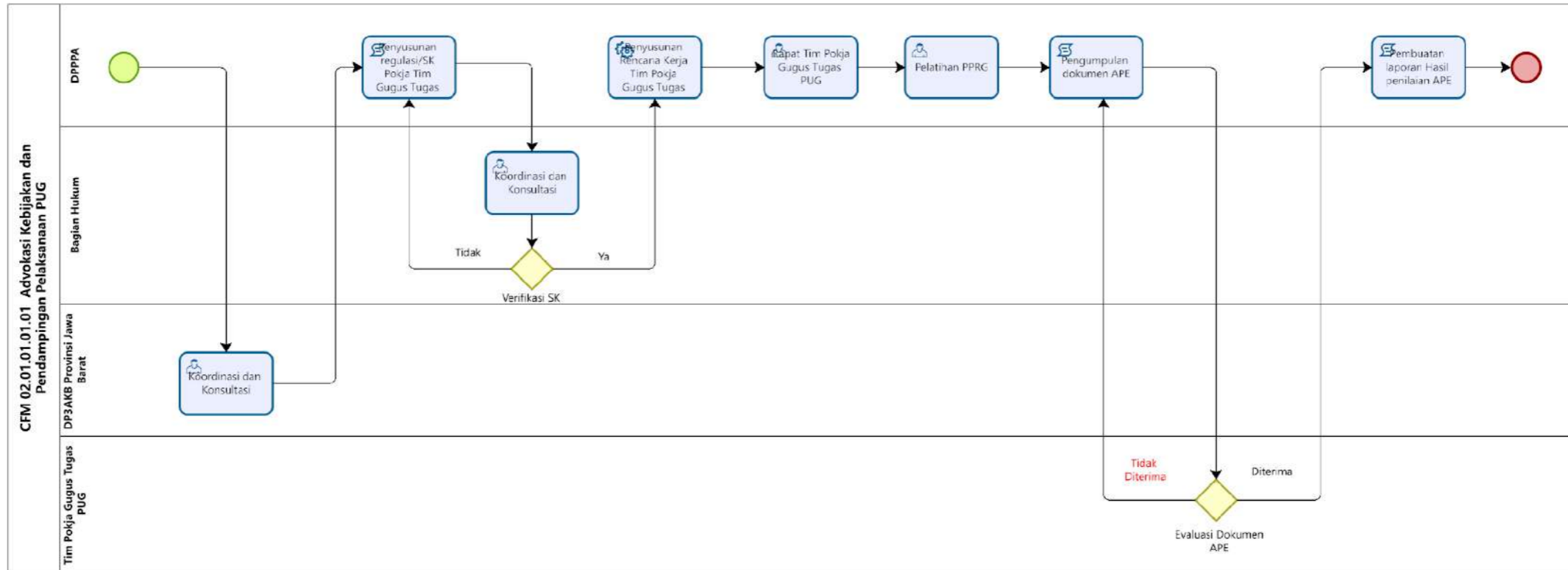
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.01

<p><b>LEVEL 3 DPPPA. 02.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG</b></p>	<p>DPPPA. 02.01.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG</p> 
---	--

# CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

## DPPPA 02.01.01.01



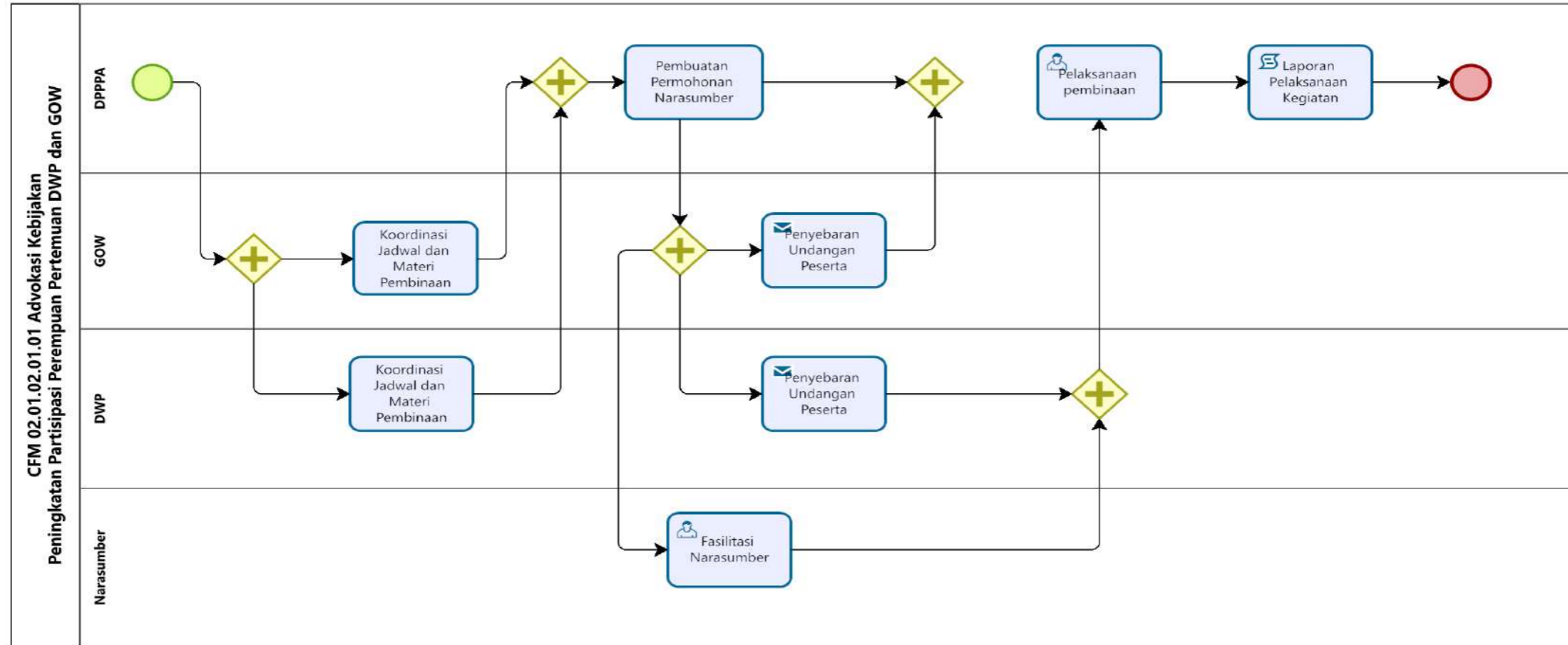
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.02



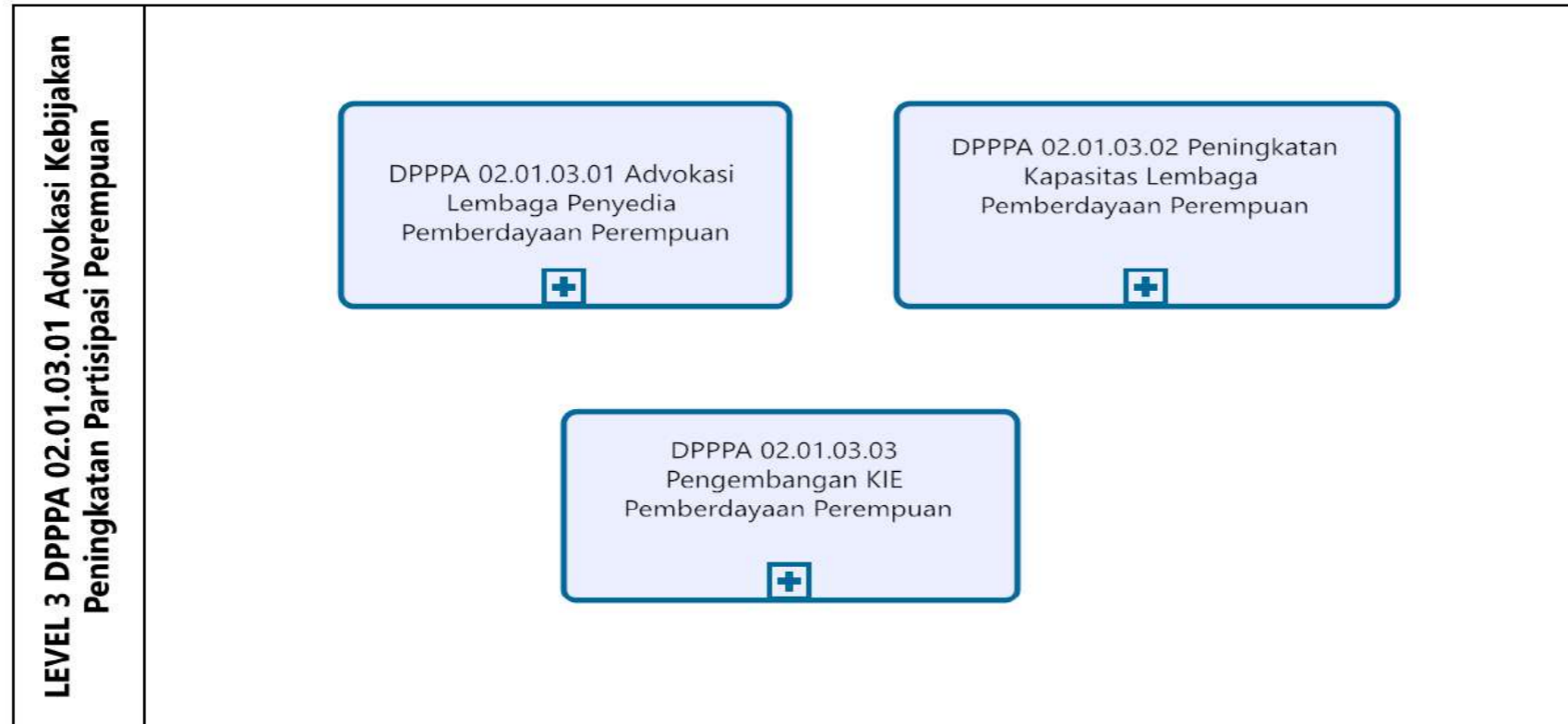
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.02.01



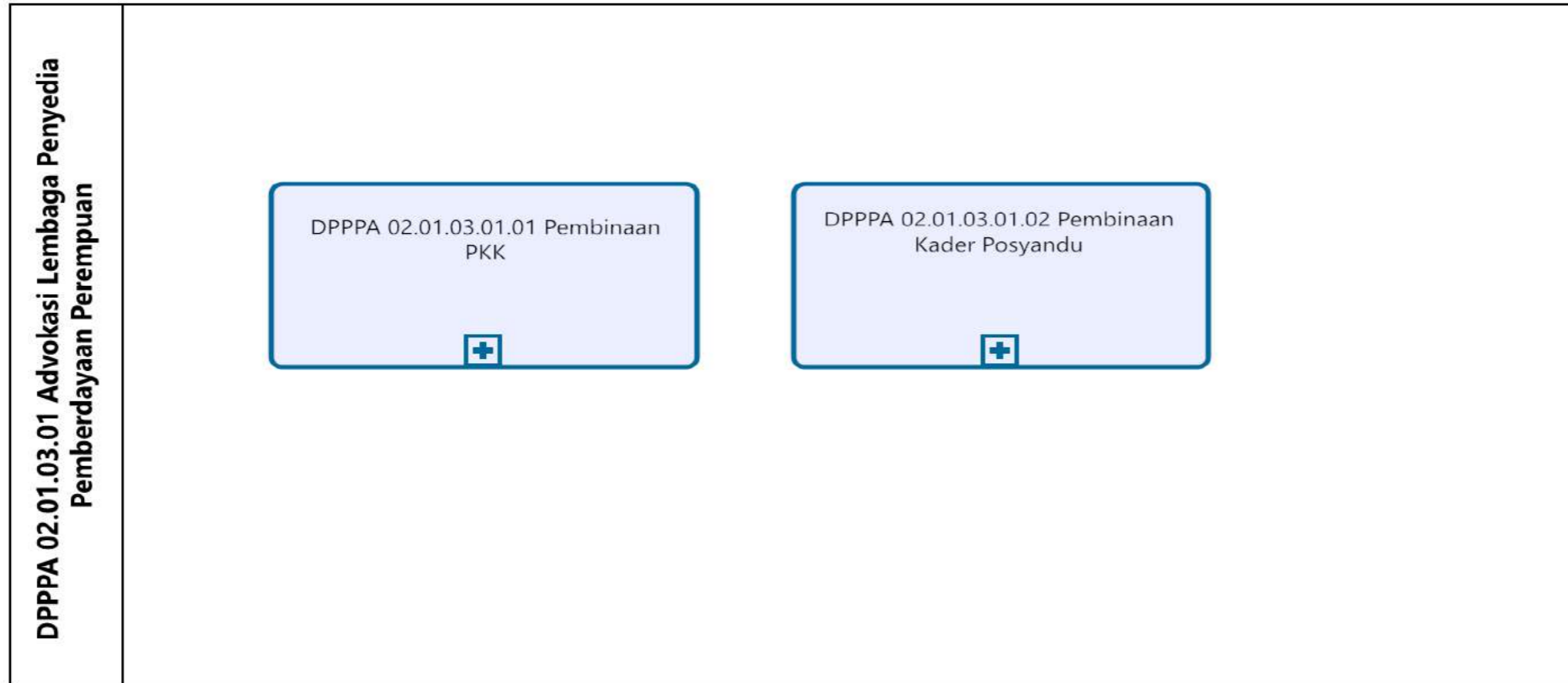
Proses Bisnis Level 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03



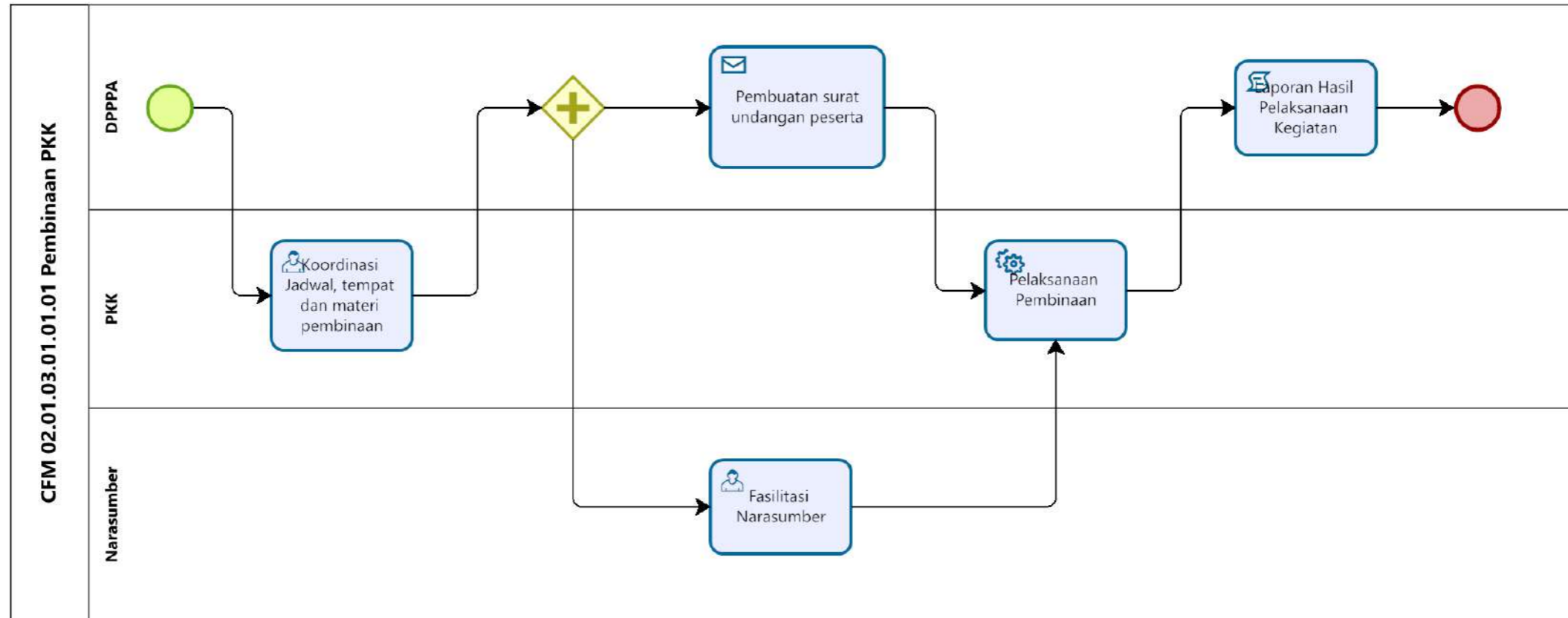
Proses Bisnis Level 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.01



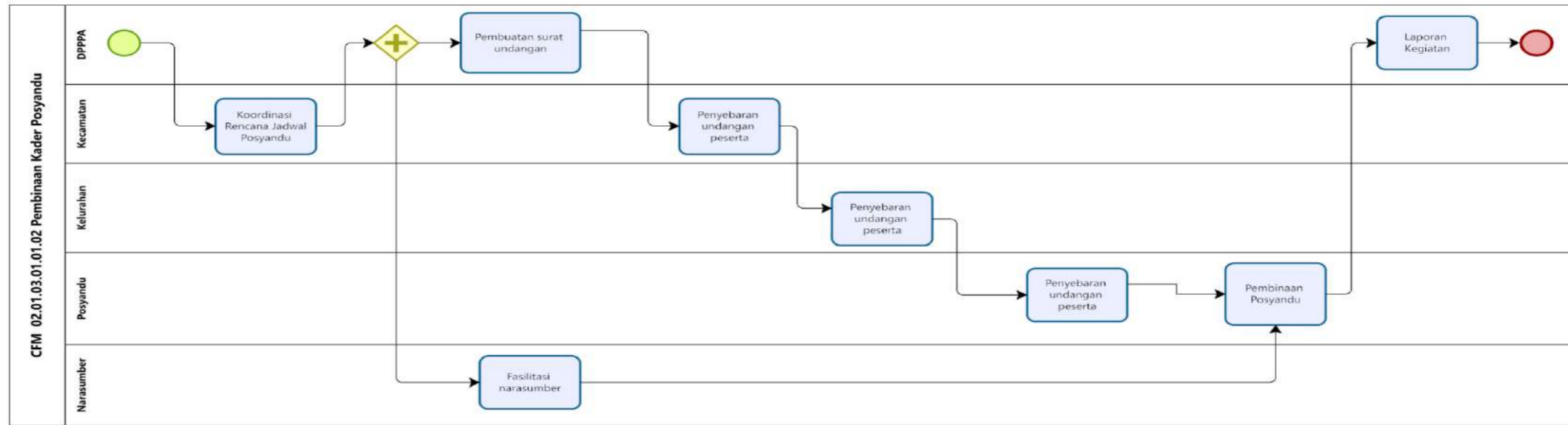
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.01.01



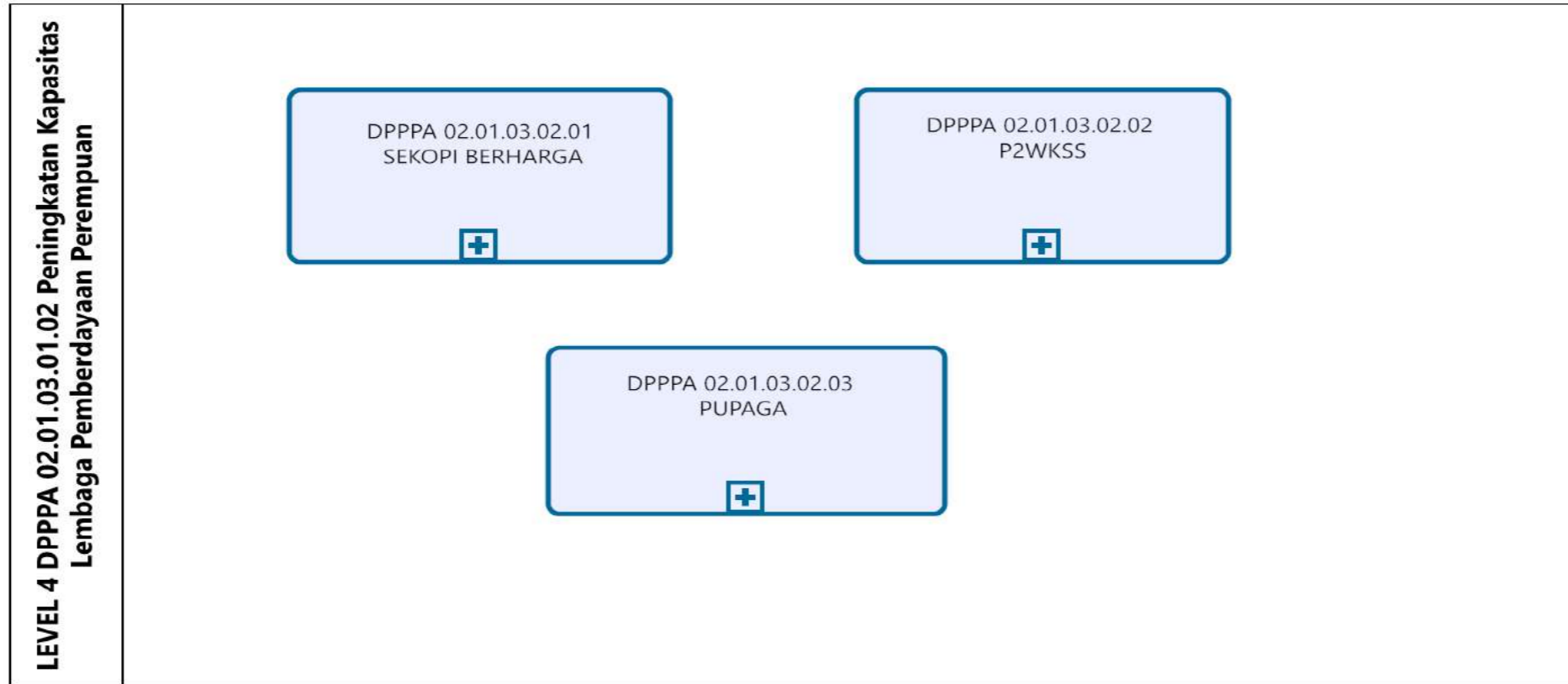
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.01.02



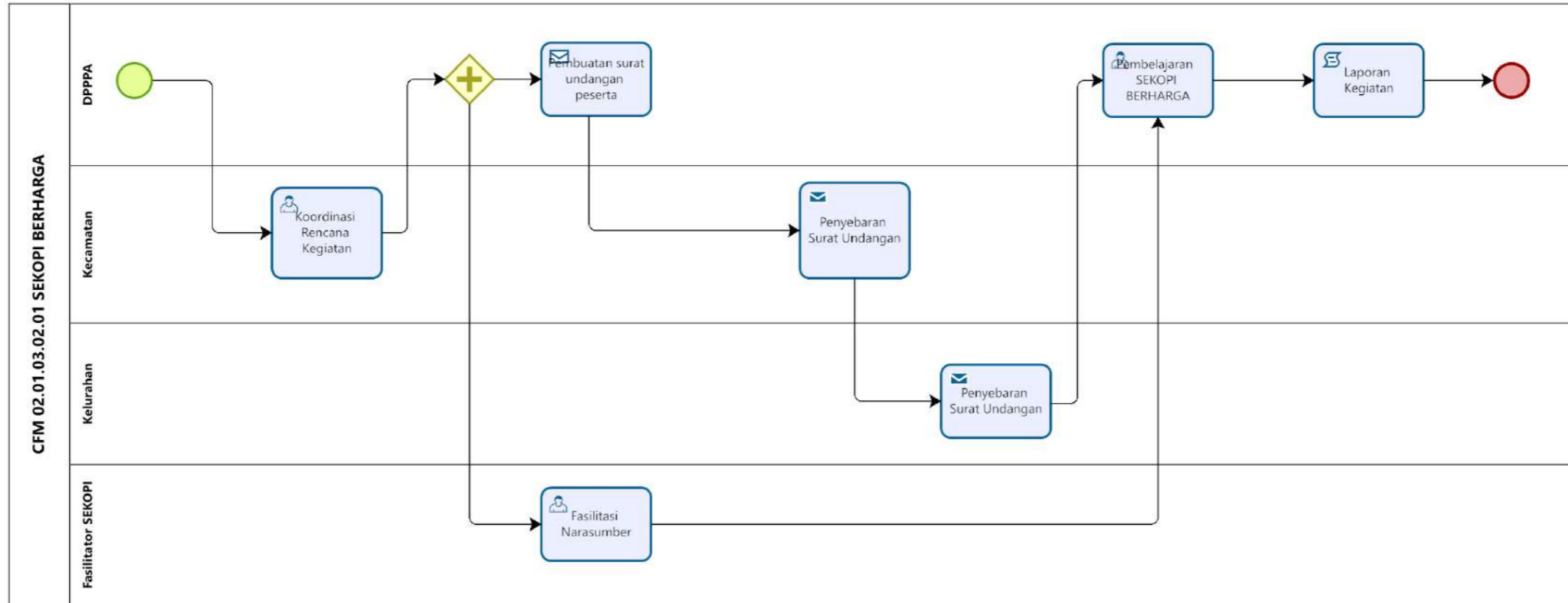
Proses Bisnis Level 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.02



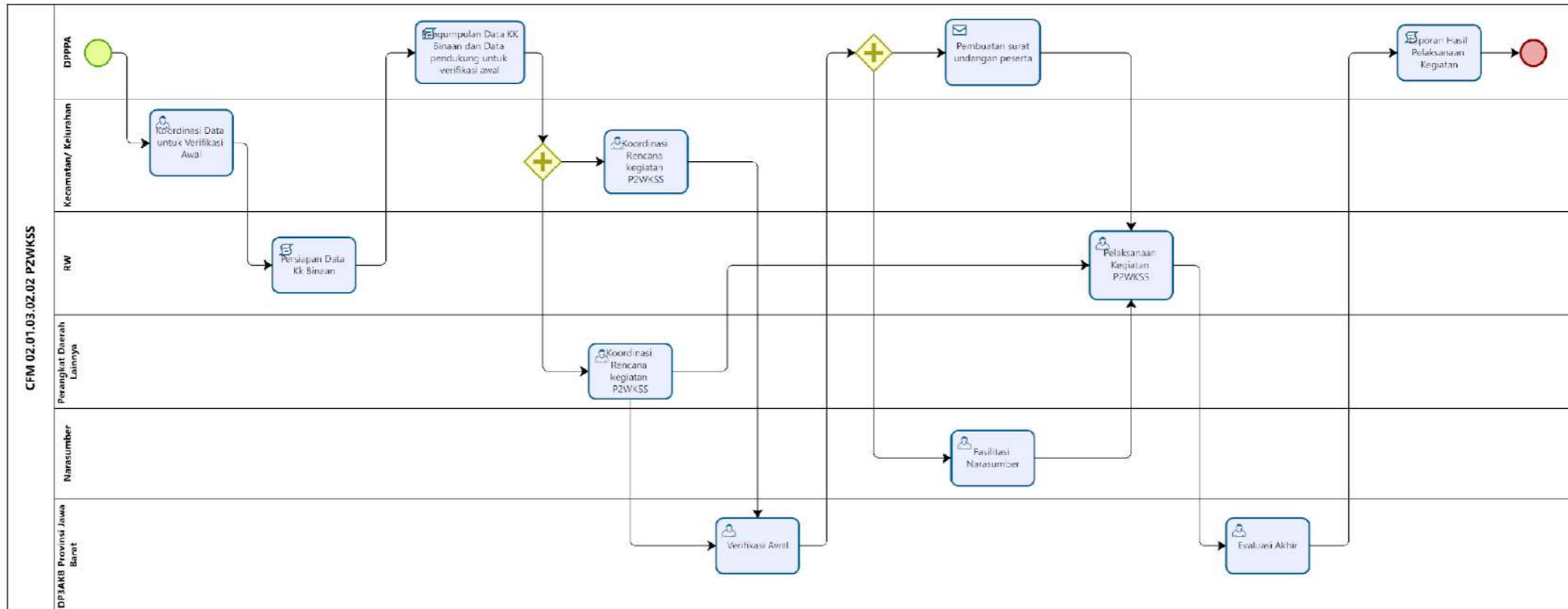
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.02.01



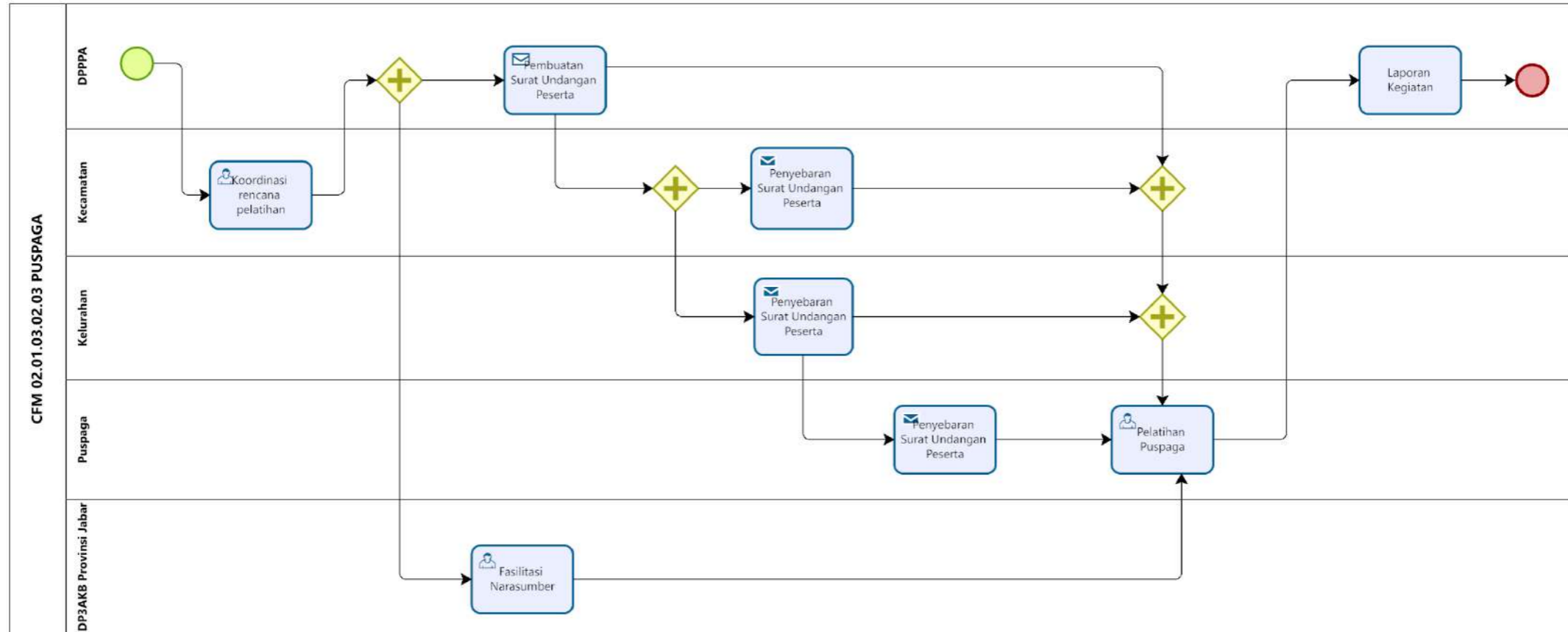
# CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.02.02



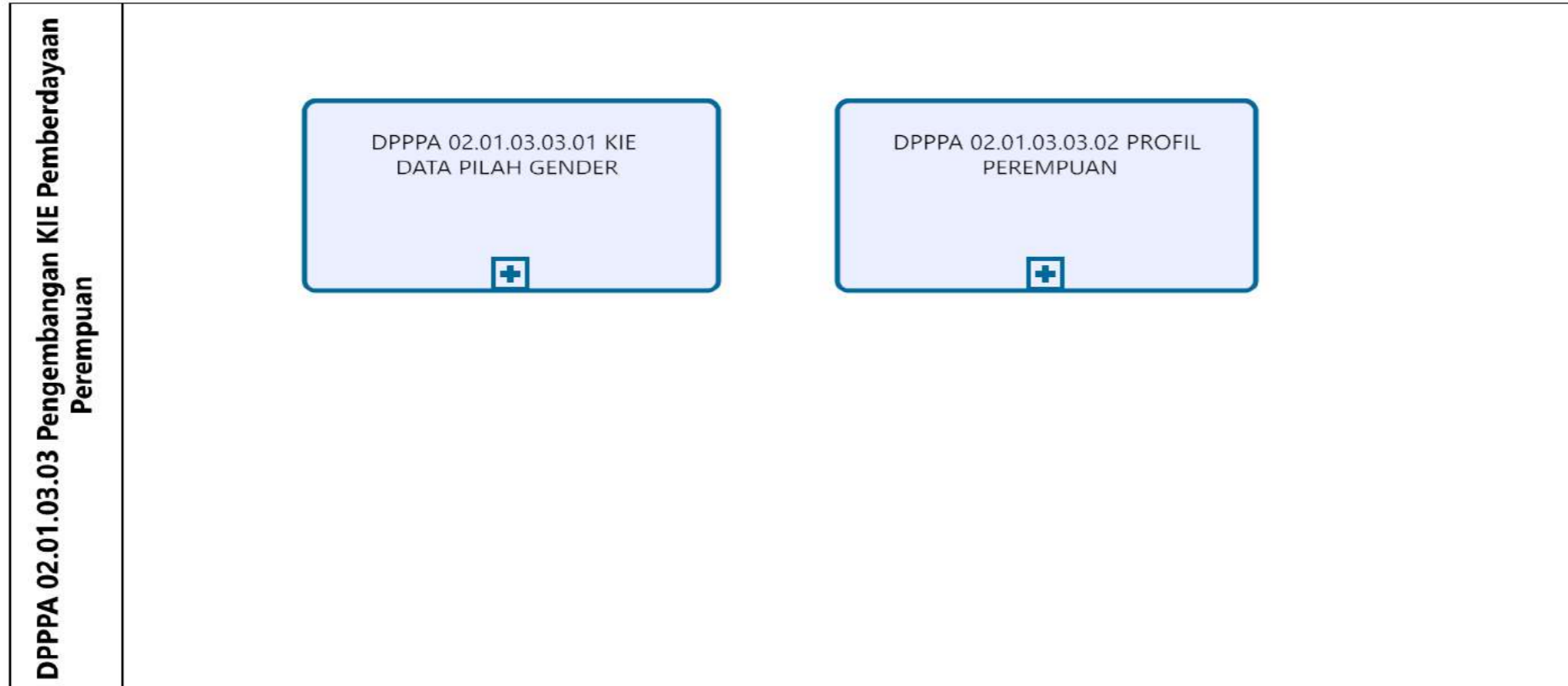
CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.02.03



Proses Bisnis Level 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

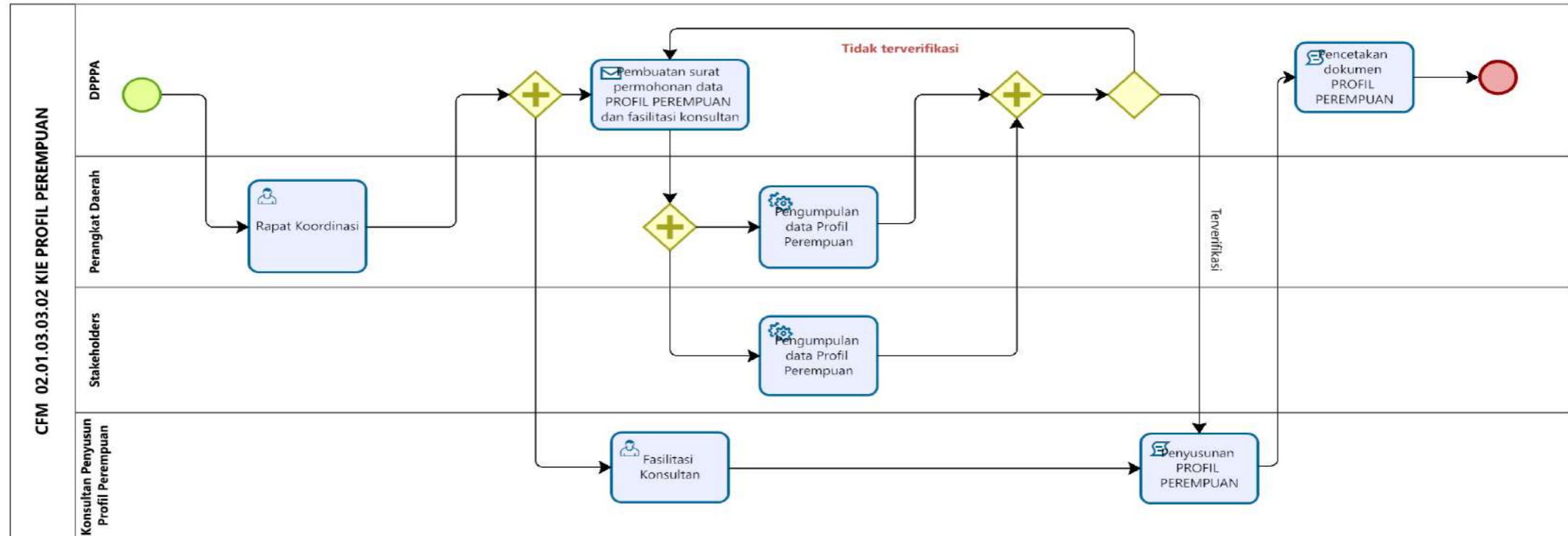
DPPPA 02.01.03.03





CFM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

DPPPA 02.01.03.03.02



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BEKASI,



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI

**MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU**

		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		Level 4		PENGAMPU
P.1	Pengelolaan Gender	P.1.1	Perlindungan Perempuan	P.1.1.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	P.1.1.1.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
				P.1.1.2	Penyediaan Layanan Bagi Perempuan	P.1.1.2.1	Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
				P.1.1.3	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	P.1.1.3.1	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (Rumah Aman)			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
		P.1.2	Pemenuhan Hak Anak	P.1.2.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	P.1.2.1.1	Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	P.1.2.1.1.1	Advokasi Kebijakan PHA Lomba Ramah Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
								P.1.2.1.1.2	Advokasi Kebijakan PHA Profil Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
								P.1.2.1.1.3	Advokasi Kebijakan PHA Rakor Gugus Tugas KLA	Bidang Pemenuhan Hak Anak
								P.1.2.1.1.4	Advokasi Kebijakan PHA	Bidang Pemenuhan Hak Anak

									Operasional TPA	
								P.1.2.1.1.5	Advokasi Kebijakan PHA Sosialisasi SRA	Bidang Pemenuhan Hak Anak
				P.1.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak	P.1.2.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (KHA)			Bidang Pemenuhan Hak Anak
						P.1.2.2.2	Pengembangan KIE Kualitas Hidup	P.1.2.2.2.1	KIE Pembentukan FORAKSI	Bidang Pemenuhan Hak Anak
								P.1.2.2.2.2	KIE JAMBORE FORAKSI	Bidang Pemenuhan Hak Anak
								P.1.2.2.2.3	FORAKSI GOES TO SCHOOL	Bidang Pemenuhan Hak Anak
		P.1.3	Perlindungan Khusus Anak	P.1.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	P.1.3.1.1	Advokasi Pendampingan Perangkat Daerah			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
				P.1.3.2	Penyediaan Layanan Perlindungan Khusus Anak	P.1.3.2.1	Pendampingan Visu			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
						P.1.3.2.2	Pendampingan Hukum			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap

										Perempuan dan Anak
						P.1.3.2.3	Pengawasan dan Penanganan Kasus			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
						P.1.3.2.4	Trauma Healing			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
						P.1.3.2.5	Layanan TERPANA			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
				P.1.3.3	Penguatan Pengembangan Lembaga Perlindungan Khusus Anak	P.1.3.3.1	Operasional KPAD			Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
P.2	Pemberdayaan Perempuan	P.2.1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	P.2.1.1	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	P.2.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG			Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayan Perempuan dan Kualitas Keluarga
				P.2.1.2	Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	P.2.1.2.1	Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan			Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayan Perempuan dan Kualitas Keluarga
				P.2.1.3	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan	P.2.1.3.1	Advokasi Lembaga Penyedia Pemberdayaa	P.2.1.3.1.1	Pembinaan PKK	Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayan

					Pemberdayaan		Perempuan			Perempuan dan Kualitas Keluarga
								P.2.1.3.1.2	Pembinaan Kader Posyandu	
						P.2.1.3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Perempuan	P.2.1.3.2.1	SEKOPI BERHARGA	Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayan Perempuan dan Kualitas Keluarga
								P.2.1.3.2.2	P2WKSS	
								.3	PUSPAGA	
						P.2.1.3.3	Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan	P.2.1.3.3.1	KIE Data Pilah Gender	Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayan Perempuan dan Kualitas Keluarga
								P.2.1.3.3.2	Profil Perempuan	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BEKASI,



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI